



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan | Akuntabel | Kompeten
Berimanis |oyal | Adaptif | Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI TAHUN 2024



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR LAMPIRAN	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
KATA PENGANTAR	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Isu-isu Strategis.....	5
1.5 Cascading Kinerja	7
1.6 Peta Proses Bisnis	9
1.7 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA DINAS	12
2.1 Rencana Strategis	12
2.2 Tujuan dan sasaran	13
2.3 Kebijakan, Strategi dan Program	16
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINAS	22
3.1 Analisis Capaian kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2023 ..	25
3.2 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 – 2023	24
3.3 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan akhir periode renstra.....	31
3.4 Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi nasional (target SPM)..	33
3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi	34
3.6 Pencapaian kinerja dan anggaran	37
3.7 Efisiensi penggunaan sumber daya	38
3.8 Prestasi dan Penghargaan	40
BAB IV PENUTUP	47

DAFTAR LAMPIRAN

1. Matrik Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2021-2026;
2. Rencana Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2024;
3. Perjanjian Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2024;
4. Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2024;
5. Pengukuran Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2024;
6. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Realisasi Belanja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2024;
7. Dokumentasi Kegiatan Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2024;

DAFTAR TABEL

Tabel I	xiii
Tabel II	xiv
Tabel III	xv
Tabel IV	xv
Tabel V	xvii
Tabel VI	xx
Tabel 1.7.1	10
Tabel 2.2.1	15
Tabel 2.3.1	17
Tabel 2.3.2	18
Tabel 2.4.1	19
Tabel 2.4.2	19
Tabel 2.4.3	20
Tabel 3.1	23
Tabel 3.2	24
Tabel 3.1.1	26
Tabel 3.2.1	30
Tabel 3.4.1	33
Tabel 3.6.1	37
Tabel 3.7.1	39
Tabel 3.8.1	40
Tabel 3.3	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2.1	4
Gambar 1.5.1	8
Gambar 1.6.1	9
Gambar 2.1.1	13
Gambar 3.8.1	41

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2024 dapat tersusun dengan baik, sekalipun dalam penyusunannya kami berusaha semaksimal mungkin namun Laporan LKj ini masih memiliki banyak kekurangan, dan kami akan berusaha lebih untuk memperbaiki segala kekurangan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai ini merupakan perwujudan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini dimaksudkan juga untuk memudahkan organisasi mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja, tugas-tugas pokok dan fungsinya pada kewenangan urusan di bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Efisiensi dalam penggunaan anggaran sesuai dengan APBD Kota Dumai sebagai penunjang kinerja kegiatan yang berada di bawah kendali Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai.

Namun kami sadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehubungan dengan hal tersebut kami sangat mengharapkan masukan, saran, pendapat, pertimbangan maupun kritikan yang bersifat membangun demi penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai pada tahun mendatang.

Demikian penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan/evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pembangunan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai khususnya dan Kota Dumai pada umumnya di tahun berikutnya.

Kota Dumai Januari 2024
KEPALA DINAS SOSIAL DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



drg. HERMIYATI

Pembina Utama Muda
NIP. 19711229 200012 2 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai merupakan salah satu Perangkat Daerah Kota Dumai yang dibentuk berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan ke 4 Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan mempunyai tugas yaitu membantu Wali kota Dumai melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Sebagaimana Peraturan Wali kota Dumai Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, maka sebagai unsur teknis, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai menjalankan fungsi : a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup fungsinya; b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup fungsinya; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup fungsinya; d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya; dan e. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.

Sejalan dengan tugas dan fungsi yang diemban, maka Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai melaksanakan MISI yang ke 1 dan 4 RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 yaitu ***“Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing dan Bertumpu Pada Kepelabuhanan dan Industri”*** dan ***“Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik”*** dan SASARAN yang ke 2 pada misi 1 dan sasaran ke 2 pada misi 4 yang merupakan Tujuan Srategis Organisasi yaitu ***“Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai”*** dan ***“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”***

Secara umum Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai 2021-2026 telah menetapkan 3 (tiga) Tujuan dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Keberhasilan pencapaian tersebut harus diwujudkan dan menjadi tanggungjawab organisasi dan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.

Operasionalisasi Sasaran Strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dalam menyukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai 2021 – 2026 Kota Dumai, adalah dengan ditetapkan 9 (sembilan) Program, 19 (Sembilan Belas) Kegiatan dan 60 (lima puluh lima) Sub Kegiatan dalam Rencana Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2024 antara lain:

- I. ProgramPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Sub kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis

Realisasi Anggaran

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKP
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub kegiatan Pengadaan Mebel
 - Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,

Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. Program Pemberdayaan Sosial

1. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

- Sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
- Sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
- Sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
- Sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

III. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

1. Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

- Sub kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

IV. Program Program Rehabilitasi Sosial

1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

- Sub kegiatan Penyediaan Permakanan
- Sub kegiatan Penyediaan Sandang
- Sub kegiatan Penyediaan Alat Bantu
- Sub kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
- Sub kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan

Sosial

- Sub kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan
 - Sub kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
 - Sub kegiatan Pemberian Layanan Rujukan
2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
 - Sub kegiatan Penyediaan Permakanan
 - Sub kegiatan Penyediaan Sandang
- V. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
1. Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
 - Sub kegiatan Penjangkauan Anak- Anak Terlantar
 - Sub kegiatan Rujukan Anak-Anak Terlantar
 - Sub kegiatan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar
 2. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota
 - Sub kegiatan Fasilitasi bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
- VI. Program Penanganan Bencana
1. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 - Sub kegiatan Penyediaan Makanan
 - Sub kegiatan Penyediaan Sandang
 - Sub kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
 2. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
 - Sub kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
 - Sub kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna

Siaga Bencana

VII. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

1. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 - Sub kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

VIII. Program Administrasi Pemerintahan Desa

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi
 - Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
 - Sub kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

IX. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

1. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat
 - Sub kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
 - Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
 - Sub kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
 - Sub kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

- Sub kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat
- Sub kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat kota Dumai pada Tahun 2024 mengalami 1 (satu) kali perubahan dikarenakan Perubahan Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel. I
Perjanjian Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Dumai pada Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase(%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.	100%
2.	Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan.	Persentase Kelurahan Cepat Berkembang	80%
		Persentase PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) Aktif	100%
3.	Meningkatnya Penanggulangan Korban Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota	100%

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis PD sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp 20.000.669.600,-(Dua Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah) untuk melaksanakan 9 (sembilan) Program Kerja antara lain :

Tabel. II

Program Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota
Dumai Tahun 2024

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Rp 5.715.592.440,-	APBD
2.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 788.906.460,-	APBD
3.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp. 10.000.000,-	APBD
4.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 805.000.000,-	APBD
5.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 10.042.639.000,-	APBD
6.	Program Penanganan Bencana	Rp. 627.277.000,-	APBD
7.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 41.854.700,-	APBD
8.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 270.000.000,-	APBD
9.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 1.699.400.000,-	APBD
J U M L A H		Rp 20.000.669.600,-	

Kemudian seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal 2 September 2024 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel. III

Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Dumai Tahun 2024

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Rp 7.126.209.060,-	APBD

2.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 921.946.460,-	APBD
3.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp. 10.000.000,-	APBD
4.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 1.373.500.000,-	APBD
5.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 17.218.454.500,-	APBD
6.	Program Penanganan Bencana	Rp. 636.586.500,-	APBD
7.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 40.054.700,-	APBD
8.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 270.000.000,-	APBD
9.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 1.699.400.000,-	APBD
J U M L A H		Rp 29.296.151.220,-	

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran. Adapun Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel. IV

Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tar get	Realisa si	Capaian 2023	Sangat Berhasil	Berhas il	Cukup Berhas il	Tidak Berha sil
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.	100 %	100%	100%	√	-	-	-

2.	Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	Persentase Kelurahan Cepat Berkembang	80 %	86,11%	107,6%	√	-	-	-
		Persentase PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) Aktif	100 %	100%	100%	√	-	-	-
3.	Meningkatnya Penanggulangan Korban Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota	100 %	100%	100%	√	-	-	-

Berdasarkan akumulasi Capaian Indikator Kinerja Utama tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai selama tahun 2024 termasuk kategori 85% s.d 100% yaitu Sangat Berhasil.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai pada Tahun 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp 29.296.151.220,- (Dua Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah) bersumber dari APBD. Anggaran tersebut terdiri dari BELANJA OPERASI sebesar Rp. 28.498.929.220,- (Dua Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah) dan BELANJA MODAL sebesar Rp 797.222.000,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).

1.	Belanja Operasi	:	Rp.	28.498.929.220,-
2.	Belanja Modal	:	Rp.	797.222.000,-
	Jumlah	:	Rp.	29.296.151.220,-

Sedangkan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2024 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel. V
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Dumai Tahun 2024

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Tujuan: Meningkatkan Kesejahteraan Sosial							
Sasaran : Meningkatnya Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.	100%	100%	100%			
Program : - Program rehabilitasi sosial.	- Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (indikator spm)	100%	100%	100%	1.373.500.000	1.220.878.592	88,89%

- Program pemberdayaan sosial.	- Persentase (%) potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kab/kota yang diberdayakan	100%	100%	100%	921.946.460	782.308.700	84,85%
- Program perlindungan dan jaminan sosial.	-Persentase (%) pmks yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	100%	17.218.454.500	8.695.792.900	50,50%
- Program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	- Persentase (%) warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di daerah kab/kota ke desa/kelurahan asal	100%	100%	100%	10.000.000	5.650.000	56,50%
- Program pengelolaan taman makam pahlawan.	- Persentase (%) pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kab/kota	100%	100%	100%	40.054.700	34.806.400	86,90%

Tujuan: Meningkatkan Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Sasaran : Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	- Persentase Kelurahan Cepat Berkembang	80%	86,11%	107,6%			
	- Persentase PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) Aktif	100%	100%	100%			

Program : - Program administrasi pemerintahan desa.	- Persentase Kelurahan yang Tertib Administrasi Pemerintahannya	100%	100%	100%	270.000.000	176.163.687	65,25%
- Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga Adat dan masyarakat hukum adat.	- Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) yang Aktif	100%	100%	100%	1.699.400.000	1.153.937.498	67,90%
Tujuan: Meningkatkan Penanggulangan Korban Bencana							
Sasaran : Meningkatnya Penanggulangan Korban Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota (indikator spm)	100%	100%	100%			
Program : - Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota (indikator spm)	100%	100%	100%	636.586.500	291.689.600	45,82%

Sebagaimana uraian tersebut di atas, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai menganggarkan Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam APBD Tahun 2023. Adapun Efisiensi penggunaan Sumber Daya Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel. VI

Efisiensi penggunaan Sumber Daya Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2024

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA (%)	PENYERAPAN ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI	KET
1	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.	100%	88,89	1,12%	Efisien
2	Meningkatkan Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Persentase Kelurahan Cepat Berkembang	107,6%	65,25	1,65%	Efisien
		Persentase PKK Aktif	100%	67,90	1,47%	Efisien
3	Meningkatkan Penanggulangan Korban Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota (indikator spm)	100%	45,82	2,18%	Efisien

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pada Indikator Kinerja Utama pertama yaitu Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti, tingkat efisiensinya adalah 1,12% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (88,89%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;
2. Pada Indikator Kinerja Utama kedua yaitu Persentase Kelurahan Cepat Berkembang tingkat efisiensinya adalah 1,65% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (107,6%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (65,25%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan

Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;

3. Pada Indikator Kinerja Utama ketiga yaitu Persentase PKK Aktif tingkat efisiensinya adalah 1,47% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (67,90%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;
4. Pada Indikator Kinerja Utama keempat yaitu Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota tingkat efisiensinya adalah 2,18% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (45,82%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Dalam pembuatan LKIP suatu instansi harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif, yaitu besaran dalam jumlah satuan atau persentase.

Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif, dan akuntabel terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Pertanggungjawaban kinerja dapat dicermati dengan menggunakan sistem dan prosedur yang sama, sebagaimana sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan keputusan/petunjuk pelaksanaannya. Pertanggungjawaban kinerja dimulai dari pengukuran kinerja masing-masing kegiatan. Selanjutnya dari hasil pengukuran kinerja dilakukan prosedur evaluasi kinerja dimulai dari evaluasi kinerja, evaluasi kinerja program dan evaluasi kinerja kebijakan daerah.

Penyusunan LKIP juga merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Sei E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 1 Sei E);

4. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
5. Peraturan Walikota Dumai Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 12 Seri D).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2024 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi. Sebagai media hubungan kerja organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab (responsibilities) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun amanah, terkait dengan berbagai sumberdaya yang digunakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dibentuk berdasarkan Peraturan Wali kota Dumai Nomor 44 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali kota Dumai Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada

dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai menjalankan fungsi antara lain:

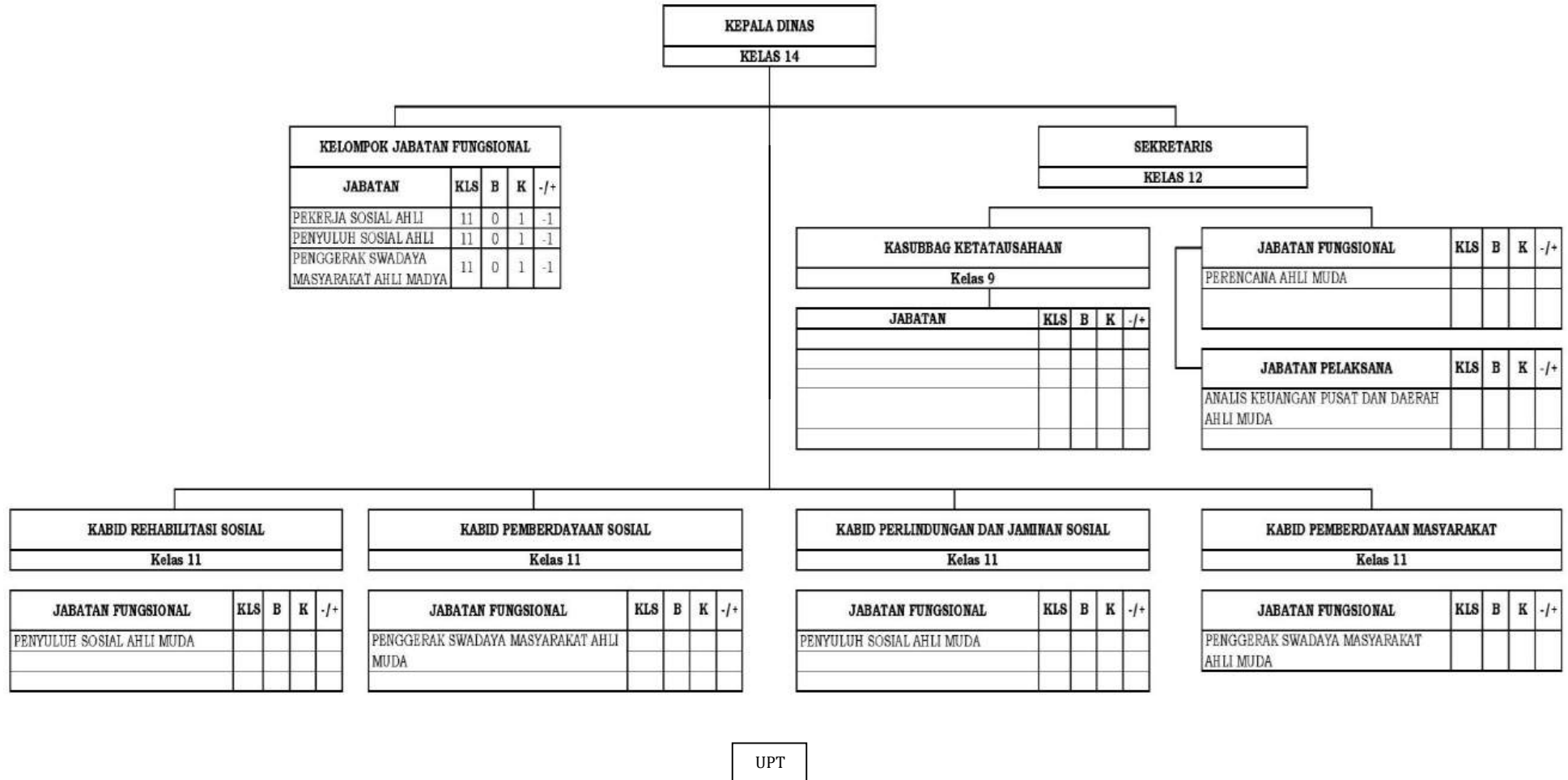
1. Perumusan Kebijakan Bidang Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan Bidang Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Bidang Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
5. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai terdiri dari :

1. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
2. Sekretariat Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat :
 - a. Subbagian Ketatausahaan, Keuangan dan Aset
 - b. Jabatan Fungsional Perenca Ahli Muda
 - c. Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
3. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial membawahi :
 - a. Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial Ahli Muda
4. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial membawahi :
 - a. Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda
5. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi :
 - a. Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial Ahli Muda
6. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat membawahi :
 - a. Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda
7. Kepala Unit Pelayanan Terpadu (UPT), membawahi :
 - a. Kepala Subbagian Tata Usaha

Gambar 1.2.1

Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai



1.3 Maksud dan Tujuan

Kegiatan penyusunan dokumen laporan kinerja (LKIP) merupakan bentuk laporan capaian kinerja dinas dengan maksud sebagai pertanggungjawaban kerja selama tahun 2024, dengan tujuan :

- 1.3.1 Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- 1.3.2 Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan;
- 1.3.3 Mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan dalam pelaksanaan tugas dan tindaklanjut tahun berikutnya;
- 1.3.4 Merupakan media dalam upaya menyempurnakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik.

1.4 Isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai tidak dapat terlepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Perumusan isu–isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan, dan tantangan yang harus diminimalisir dampaknya dalam pelaksanaan pencapaian program.

Isu strategis terkait dengan urusan bidang sosial yang perlu ditangani sbb:

1. Masih tingginya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Dumai;

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar .Berbagai permasalahan sosial yang berkembang masih relatif tinggi, hal ini terlihat pada masih tingginya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di kota Dumai. Di tahun 2024 jumlah PPKS di kota Dumai sebanyak 132.811 jiwa (*sumber data bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (data DTKS) dan Rehabilitasi Sosial*).

1. Kebutuhan layanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang meningkat;

Permasalahan Kesejahteraan Sosial timbul dari dapat atau tidaknya kebutuhan manusia terpenuhi. Permasalahan kesejahteraan sosial ada yang secara nyata berpangkal pada hambatan-hambatan dalam pemenuhan kebutuhan. Salah satu faktor kebutuhan layanan sosial meningkat adalah jumlah PPKS yang masih relatif tinggi.

2. Sarana dan Prasarana serta Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelayanan kepada PPKS masih minim;

Dalam pembangunan kesejahteraan sosial sarana dan prasarana serta SDM mempunyai peran yang tidak kalah penting. Salah satunya adalah sarana mobilitasi operasional dan tenaga Profesional dalam proses penanganan sosial yang sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan. Ketersediaan sarana, prasarana dan SDM yang masih minim tentunya mempengaruhi pencapaian hasil yang diinginkan, sehingga masalah ini menjadikan suatu hambatan tersendiri.

3. Perlunya bantuan dan jaminan sosial serta perlindungan sosial bagi Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lansia terlantar, Gelandangan dan Pengemis diluar Panti Sosial dan korban bencana;

Dalam mencapai peningkatan kapasitas dan kinerja daerah provinsi/ kabupaten/ kota dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial (jaminan dan perlindungan sosial) dilihat menggunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial No 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/ Kota. Layanan dasar SPM itu adalah rehabilitasi sosial dasar pada penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lansia terlantar, Gelandangan dan Pengemis diluar Panti Sosial dan penanganan korban bencana.

4. Belum optimalnya sistem pendataan bagi penduduk miskin dan rentan miskin;

Masalah data dalam penyaluran bantuan menjadi masalah urgent di Indonesia. Hal ini selalu menjadi masalah utama ketika Pemerintah melalui Kementerian atau Dinas terkait akan menyalurkan bantuan-bantuan sosial, seperti Bantuan Langsung Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan sosial lainnya yang di danai oleh APBD yang bersifat accidental ataupun terprogram. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi masalah utama dalam penyaluran bantuan tersebut. Pemerintah Pusat mengambil data kemiskinan dengan indikator kemiskinan tersendiri. Akibatnya terjadi data yang tidak sesuai dengan tujuan bantuan, data ganda yang mendapat bantuan, dan yang tidak mendapatkan bantuan.

5. Perlunya pengembangan sumber daya Pegawai dan kerjasama serta Koordinasi pelaksanaan Kegiatan.

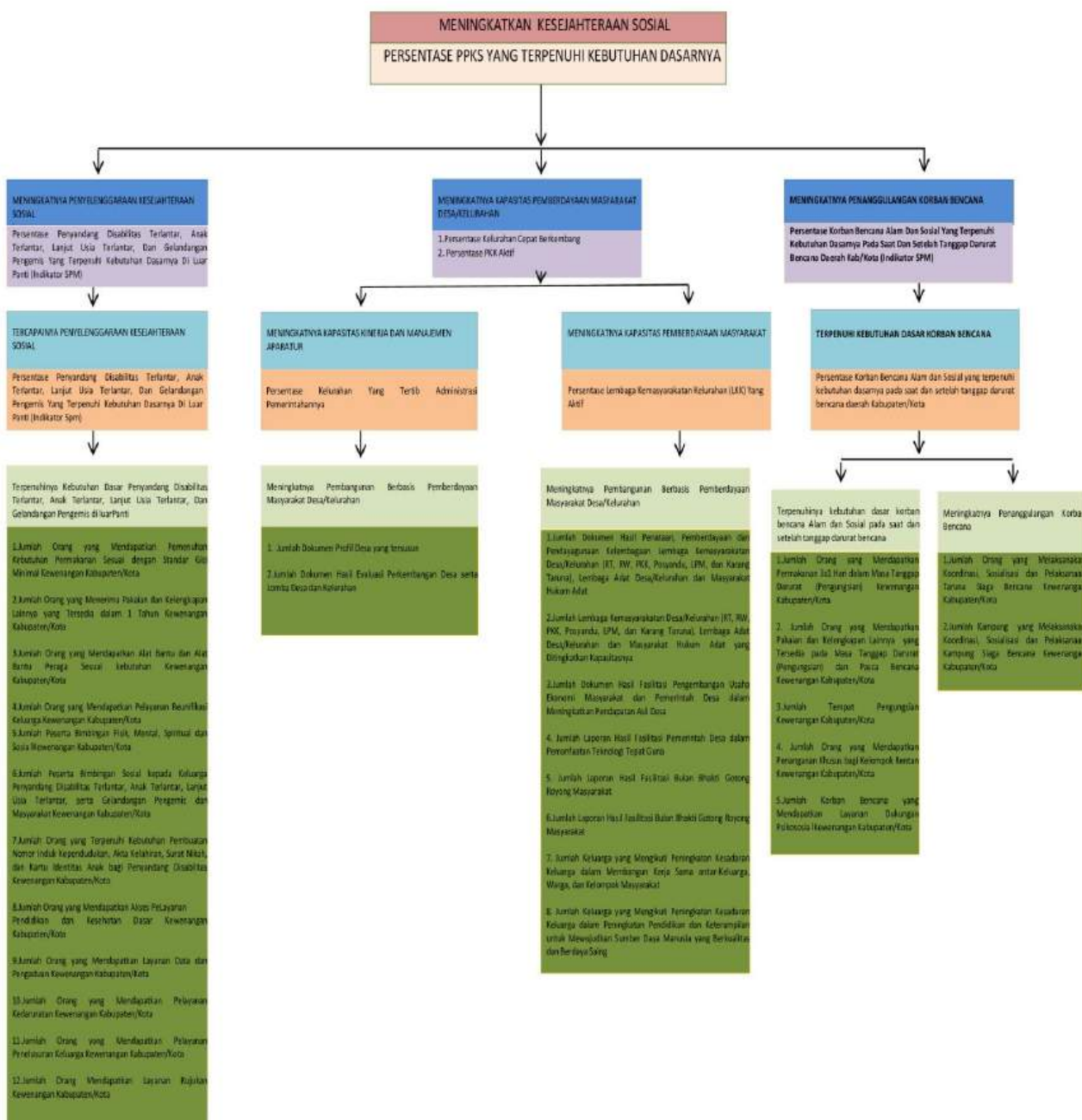
Permasalahan sumber daya pegawai pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai bidang terkait kesejahteraan sosial untuk tenaga teknis masih kurang, padahal untuk menunjang kegiatan dilapangan sangat diperlukan tenaga yang profesional yang sesuai dengan bidangnya dalam rangka peningkatan mutu pelayanan di masyarakat.

1.5 Cascading Kinerja

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Setiap Perangkat Daerah) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Wali kota Dumai Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar 1.5.1

POHON KINERJA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI

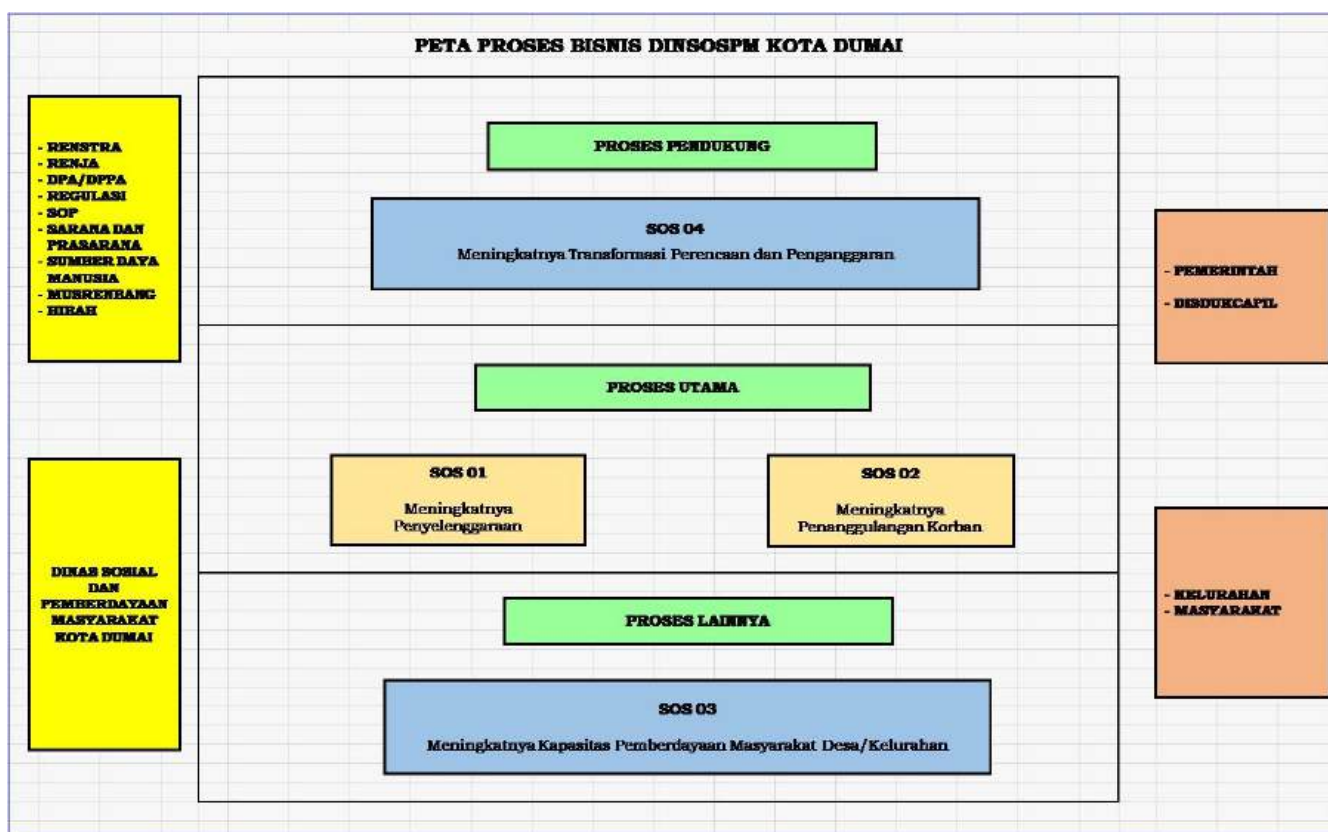


6 Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Peta proses Bisnis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai sebagaimana skema berikut :

Gambar 1.6.1

Peta Proses Bisnis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat



1.7 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023

Berdasarkan laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai sebagaimana tertuang dalam Surat Inspektur Daerah Kota Dumai Nomor 700/1302.1/INSP-S Tanggal 8 Desember 2023 Hal Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Internal Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2023 telah disampaikan saran/rekomendasi antara lain:

NO	REKOMENDASI LHE 2023	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/ PROGRES PENYELESAIAN	AKSI/ EVIDEN
1	Kepada Seluruh ASN pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat agar membuat Perjanjian Kinerja secara berjenjang, mulai dari Kepala Dinas sampai level pelaksana.	Membuat Perjanjian Kinerja seluruh ASN pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat secara berjenjang, mulai dari Kepala Dinas sampai level pelaksana.	1 Dokumen	Februari 2024 (sampai level pelaksana)	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Sudah terlaksana	Perjanjian Kinerja (PK) seluruh ASN pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai: http://bit.ly/42HbtM7
2	Kepada Seluruh ASN pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat agar membuat Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja yang merupakan gambaran perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja secara berjenjang, mulai dari kepala Dinas sampai level pelaksana.	Membuat Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja seluruh ASN pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat secara berjenjang, mulai dari Kepala Dinas sampai level pelaksana.	1 Dokumen	Februari 2024 (sampai level pelaksana)	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Sudah terlaksana	Rencana Aksi atas PK seluruh ASN pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai: https://bitly.cx/8QhN
3	Dalam Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, agar kedepannya menyajikan narasi dan/atau definisi	Menyajikan narasi dan/atau definisi yang jelas atas kinerja dan cara	1 Dokumen	Januari 2024	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Sudah terlaksana	LKjIP Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2023(Bab III Akuntabilitas Kinerja) dapat

	yang jelas atas kinerja dan cara mengukur capaian kinerja.	mengukur capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).					dilihat pada link berikut : https://drive.google.com/file/d/1JxjUSscr8zlA2KUEefjroPMwldS7mAa4/view?usp
4	Dalam menyusun Laporan Kinerja, agar kedepannya menyampaikan secara jelas terkait efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.	Menyampaikan secara jelas terkait efisiensi atas penggunaan sumber daya untuk mencapai kinerja dalam menyusun laporan kinerja.	1 Dokumen	Januari 2024	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Sudah terlaksana	LKjIP Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2023(Bab III Akuntabilitas Kinerja _ 3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya) dapat dilihat pada link berikut : https://drive.google.com/file/d/1JxjUSscr8zlA2KUEefjroPMwldS7mAa4/view?usp
5	Dalam menyusun Laporan Kinerja, agar kedepannya menyampaikan secara rinci terkait analisa penyebab keberhasilan atau kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan atas kinerja yang telah ditetapkan.	Menyampaikan secara rinci terkait analisa penyebab keberhasilan atau kegagalan pada laporan kinerja.	1 Dokumen	Januari 2024	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Sudah terlaksana	LKjIP Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2023(Bab III Akuntabilitas Kinerja _ 3.1 Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023) dapat dilihat pada link berikut : https://drive.google.com/file/d/1JxjUSscr8zlA2KUEefjroPMwldS7mAa4/view?usp

BAB II
PERENCANAAN KINERJA
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan akhir tahun 2024 secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain, kondisi riil, potensi, hambatan, resiko serta pengembangan kedepan, sehingga tujuan dan sasaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dapat mendukung perwujudan visi dan misi Kota Dumai. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2024.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai membuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai. RENSTRA juga memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan sebagai bagian dari **Perjanjian Kerja Kepala Perangkat Dearah dengan Kepala Daerah**.

Perjanjian Kinerja yang dibuat setiap tahun berkaitan erat dengan Erat kaitannya dengan pencapaian visi misi Kota Dumai, maka dokumen perencanaan strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai harus dapat mengintegrasikan kepentingan dari berbagai unsur dan komponen yang ada serta dapat diimplementasikan dalam rencana kerja tahunan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Visi Kota Dumai sebagaimana dijabarkan didalam Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 adalah :

“Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)”

Visi Kota Dumai berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 yaitu “ Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong,

yang disebut sebagai nawacita kedua.

Visi ini juga berpedoman pada visi Pembangunan Provinsi Riau yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 yaitu “Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)”.

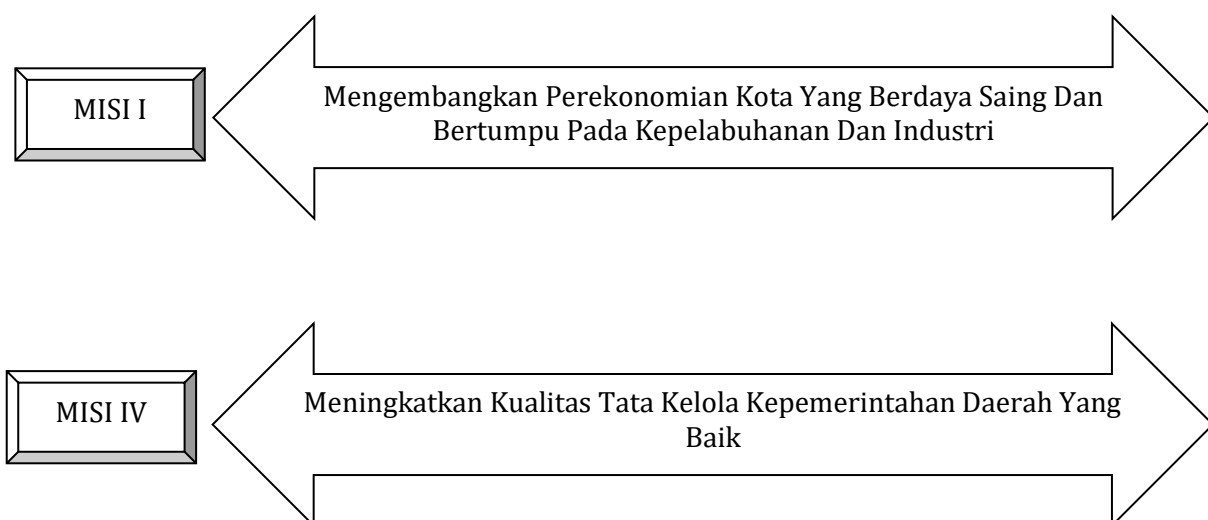
Visi Kota Dumai ini menjadi landasan seluruh masyarakat Kota Dumai dalam melaksanakan pembangunan di Kota Dumai, dan juga merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Walikota dan Wakil Wali kota Dumai dalam 5 (Lima) tahun kedepan.

Sebagai Upaya mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 4 (empat Misi Kota Dumai yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhanan Dan Industri
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu
3. Mewujudkan Insfrastruktur Wilayah Yang Berkualitas
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah Yang Baik.

Dalam mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Dumai terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai tersebut adalah pada Misi Kota Dumai:

Gambar 2.1.1



2.2 Tujuan Dan Sasaran

Untuk mendukung Visi dan Misi perubahan RPJMD Kota Dumai 2021-2026 tersebut Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai sesuai tugas pokok

dan fungsinya menetapkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan, yakni pencapaian target keberhasilan kurun waktu lima tahun kedepan dari tahun 2021 – 2026.

Dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD.

Tujuan dan Sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan strategi kinerja PD selama 5 (lima) tahun.

Tujuan yang dirumuskan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai memuat esensi dari perwujudan pelaksanaan Visi dan Misi Kota Dumai. Untuk dapat merumuskan Tujuan yang tepat, maka perlu mengacu pada Tujuan Pembangunan dalam Perubahan RPJMD Kota Dumai. Hal ini perlu dilakukan agar Tujuan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai sejalan dengan Tujuan Pembangunan Daerah.

Dari Tujuan yang telah ditetapkan, maka akan dirumuskan beberapa Sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional, dimana tata cara pencapaian target dari Sasaran itu akan dituangkan kedalam Strategi dan Arah Kebijakan. Perumusan Sasaran memperhatikan Indikator Kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai. Indikator Kinerja Sasaran inilah yang akan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai yang akan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dan dijadikan acuan pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Implementasi pembangunan berkelanjutan dengan spektrum yang luas dan mengandung pengertian komprehensif, tentunya menuntut dalam hal perencanaan, program dan pelaksanaan kegiatan melibatkan seluruh stakeholder termasuk masyarakat. Oleh karena itu, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat guna memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam melaksanakan tupoksinya dimanifestasikan dalam perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan

Masyarakat Tahun 2021 – 2026 menyesuaikan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Dumai Tahun 2021 – 2026.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dapat dilihat dari tabel berikut:

IKU WALI KOTA			IKU DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator RPJMD	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Renstra
Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera dengan indikator keberhasilan adalah laju pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kota Dumai indikator keberhasilan yaitu tingkat kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dengan indikator keberhasilan adalah Persentase pps yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Meningkatnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan indikator keberhasilan adalah Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis yang Terlantar, dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (INDIKATOR SPM)	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (INDIKATOR SPM)
			Meningkatkan Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan dengan indikator keberhasilan	Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan dengan indikator keberhasilan adalah	Persentase kelurahan cepat berkembang

			adalah Nilai Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Epdeskel)	1. Persentase kelurahan cepat berkembang 2. Persentase PKK aktif	Persentase PKK aktif
Meningkatkan Reformasi Birokrasi dengan indikator keberhasilan adalah indeks reformasi birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator keberhasilan adalah indeks kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan penanggulangan korban bencana dengan indikator keberhasilan adalah persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Meningkatnya Penanggulangan Korban Bencana dengan indikator keberhasilan adalah persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota (indikator spm)	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota (indikator spm)

2.3 Kebijakan, Strategi Dan Program

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Berdasarkan tujuan dan sasaran, maka disusunlah langkah-langkah rencana strategis dan arah kebijakan yang dioperasionalkan kedalam Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan penjabaran dari kebijakan strategis dengan tetap mengacu pada program Pembangunan Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Dalam kerangka tersebut, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra dengan berdaya guna dan berhasil guna, sebagai berikut:

Misi ke 4 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah Yang Baik

Mewujudkan infrastruktur dan Ruang kota Dumai yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan penanganan bencana	1. Mengoptimalkan upaya penanganan saat kejadian bencana 2. Mengoptimalkan upaya penanganan pasca kejadian bencana	1. Menyelenggarakan penanggulangan bencana yang terintegrasi dan lintas sektoral 2. Meningkatkan koordinasi penanganan bagi masyarakat terdampak bencana
--	---	---	---

Dengan mengacu pada strategi dan kebijakan tersebut di atas, maka dijabarkan dalam program dan kegiatan operasional Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota
2. Program Pemberdayaan Sosial
3. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban tindak kekerasan
4. Program Rehabilitasi Sosial
5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
6. Program Penanganan Bencana
7. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
8. Program Administrasi Pemerintahan Desa
9. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, kemudian dirumuskan Indikator Kinerja Utama yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3.2
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai

NO	Sasaran Strategis	
	Uraian	Indikator Kinerja Utama
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti (INDIKATOR SPM)
2.	Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	1. Persentase Pengentasan Desa/Kelurahan Tertinggal (Kurang Berkembang) 2. Persentase LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) Berprestasi/ Aktif
3.	Meningkatnya Penanggulangan Korban Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kab/Kota (INDIKATOR SPM)

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2021 - 2026, yang akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Rencana kinerja tersebut diuraikan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan komitmen Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan selama Tahun 2024.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai di Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4.1
Perjanjian Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (INDIKATOR SPM)	100%
2.	Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	Persentase Kelurahan Cepat Berkembang	80%
		Persentase PKK Aktif	100%
3.	Meningkatnya Penanggulangan Korban Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kab/Kota (INDIKATOR SPM)	100%

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai sebagaimana tertuang di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2024 didukung dengan anggaran sebesar *Rp 20.000.669.600,-(Dua Puluh Miliar Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam ratus Rupiah)* untuk melaksanakan 9 (Sembilan) Program Kerja antara lain :

Tabel 2.4.2
Program kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai
Tahun 2024

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Rp. 5.715.592.440,-	APBD

2.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 788.906.460,-	APBD
3.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp. 10.000.000,-	APBD
4.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 805.000.000,-	APBD
5.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp.10.042.639.000,-	APBD
6.	Program Penanganan Bencana	Rp. 627.277.000,-	APBD
7.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 41.854.700,-	APBD
8.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 270.000.000,-	APBD
9.	Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.	Rp. 1.699.400.000,-	APBD
J U M L A H		Rp. 20.000.669.600,-	

Seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal 29 Agustus 2024 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai tahun 2024 didukung dengan anggaran sebesar *Rp 29.296.151.220,-(Dua Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah)* adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.3

Program kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai
Perubahan Tahun 2024

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Rp. 7.126.209.060,-	APBD
2.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 921.946.460,-	APBD

3.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp. 10.000.000,-	APBD
4.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 1.373.500.000,-	APBD
5.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp.17.218.454.500,-	APBD
6.	Program Penanganan Bencana	Rp. 636.586.500,-	APBD
7.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 40.054.700,-	APBD
8.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 270.000.000,-	APBD
9.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.	Rp. 1.699.400.000,-	APBD
J U M L A H		Rp. 29.296.151.220,-	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA DUMAI TAHUN 2024

A. Capaian Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kinerja pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (*Perpres No 29 Tahun 2014*).

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai berkewajiban melaporkan hasil kinerjanya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021 – 2026.

Ketidakstabilan Anggaran Daerah Kota Dumai ditahun 2024 mengakibatkan terjadinya Tunda Bayar (Terutang) terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Kondisi ini sangat berpengaruh pada realisasi atau serapan anggaran disetiap kegiatan.

Meskipun secara kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai tercapai sesuai target yang telah ditentukan namun dilihat pada realisasi anggarannya Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai masih kurang optimal.

Dalam regulasi juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Pengukuran kinerja digunakan melalui metode pengukuran kinerja dengan Analisis Komparatif, untuk mengetahui kinerja suatu kegiatan dan sasaran dalam kurun waktu satu tahun, melalui penghitungan persentase pencapaian Rencana Tingkat Capaian (target) kegiatan dan sasaran. Pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Dalam menentukan persentase pencapaian kinerja, digunakan 2 rumus perhitungan yaitu:

1. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

a. Rumus :
$$\text{capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

2. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat

capaian (PPRTC) digunakan rumus:

$$b. \text{ Rumus : } \text{capaian} = \text{target} - \frac{\text{realisasi} - \text{target}}{\text{target}} \times 100\%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria sebagaimana tabel, yaitu :

Tabel 3.2
Atribut Capaian Indikator Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja		Atribut
	%	Keterangan Persentase	
1	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2	70% s.d < 85%	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3	55% s.d < 70%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4	< 55%	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

3.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

a. Indikator Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti-

Capaian kinerja untuk indikator Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti menunjukkan capaian yang tetap. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 100%, realisasi sebesar 100%, tercapai 100% atau bernilai kinerja ≥ 90 (sangat tinggi). Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 100% atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2024 tetap (sama dengan pencapaian tahun 2023).

Efisiensi Anggaran	11,11 %
Nilai Anggaran	Rp. 1.373.500.000,-
Capaian 2024	100 %
Target	100 %
Realisasi	100 %

b. Indikator Persentase Kelurahan Cepat Berkembang

Capaian kinerja untuk indikator Persentase Kelurahan Cepat Berkembang menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 80% realisasi sebesar 86,11% tercapai 107,6% atau bernilai kinerja bernilai kinerja ≥ 90 (sangat tinggi). Tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 disebabkan ada perubahan indikator Kinerja mengakibatkan Indikator Kinerja Utama tahun 2024 berbeda dengan Indikator Kinerja Utama tahun 2023. Capaian tahun 2024 sebagai berikut :

Efisiensi Anggaran	34,75 %
Nilai Anggaran	Rp. 270.000.000,-
Capaian 2024	107,6 %
Target	80 %
Realisasi	86,11 %

c. Indikator Persentase Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Aktif

Capaian kinerja untuk indikator Persentase PKK Aktif menunjukkan capaian yang tetap. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 100% realisasi sebesar 100% tercapai 100% atau bernilai kinerja ≥ 90 (sangat tinggi). Tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 disebabkan ada perubahan indikator Kinerja mengakibatkan Indikator Kinerja Utama tahun 2024 berbeda dengan Indikator Kinerja Utama tahun 2023. Capaian tahun 2024 sebagai berikut :

Efisiensi Anggaran	32,10 %
Nilai Anggaran	Rp. 1.699.400.000,-
Capaian 2024	100 %
Target	100 %
Realisasi	100 %

d. Indikator Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi

kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota.

Capaian kinerja untuk indikator Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota menunjukkan capaian yang tetap. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 100%, realisasi sebesar 100%, tercapai 100% atau bernilai kinerja ≥ 90 (sangat tinggi). Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 100% atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2024 tetap (sama dengan pencapaian tahun 2023).

Efisiensi Anggaran	54,18 %
Nilai Anggaran	Rp. 636.586.500,-
Capaian 2024	100 %
Target	100 %
Realisasi	100 %

3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Untuk mengukur akuntabilitas kinerja, perlu dilakukan perbandingan untuk melihat tabel peningkatan atau penurunan suatu capaian kinerja, sehingga bisa dievaluasi dan diperbaiki untuk peningkatan kinerja di tahun berikutnya. Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.1

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			0%	%	%	%	%	%	%	%	%

2.	Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan.	<i>Persentase pengentasan desa/kelurahan tertinggal (kurang berkembang).</i>	47 %	42%	-	73%	75%	-	155 %	179 %	-
		Persentase Kelurahan Cepat Berkembang	-	-	80%	-	-	86,1 %	-	-	107,6%
		<i>Persentase LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) berprestasi/aktif.</i>	100 %	100 %	-	100 %	100 %	-	100 %	100 %	-
		Persentase PKK Aktif	-	-	100 %	-	-	100 %	-	-	100 %
3.	Meningkatnya Penanganan Korban Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Keterangan :

- Indikator Kinerja Utama lama
- Indikator Kinerja Utama baru

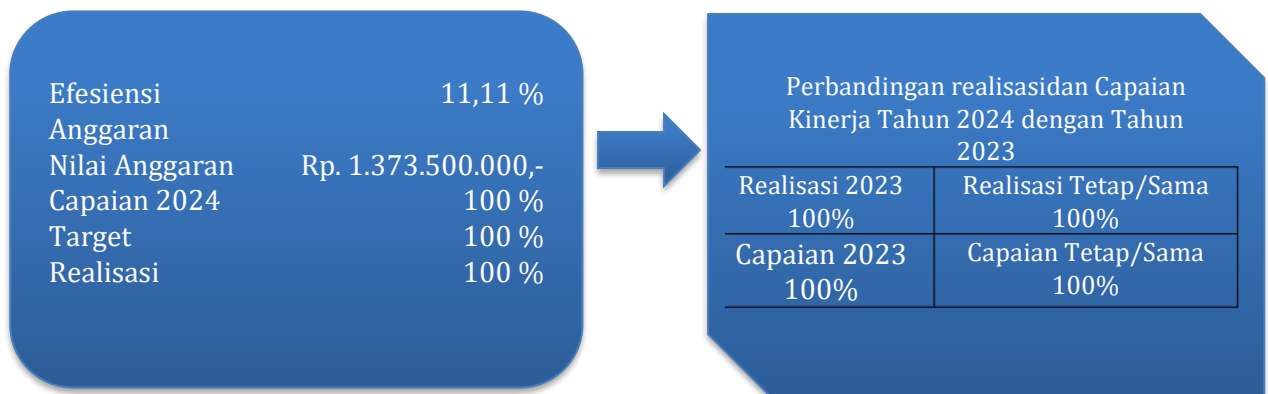
Dari perbandingan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. a. Terdapat 4 (empat) Indikator Kinerja Utama yang harus diampu oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai selama 5 tahun kedepan. Indikator pertama adalah Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dengan target pada tahun 2022 adalah 100% (Indikator SPM) berasal dari perhitungan jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti dibagi dengan populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis dikali 100%. Perhitungan ini berpedoman pada Permendagri nomor 59

tahun 2021 dan Permensos nomor 9 tahun 2018 yaitu terkait Penerapan Teknis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal. Pada tahun 2022 populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis berjumlah 1.860 jiwa yaitu yang terdiri dari : penyandang disabilitas terlantar sebanyak 595 jiwa, anak terlantar 7 jiwa, lanjut usia terlantar 1.210 jiwa, dan Gelandangan Pengemis (OT) sebanyak 48 jiwa. Realisasi pada tahun 2022 adalah 100% dengan capaian 100%

b. Pada tahun 2023 populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis berjumlah 2.283 jiwa, yang terdiri dari : penyandang disabilitas terlantar sebanyak 460 jiwa, anak terlantar 16 jiwa, lanjut usia terlantar 1.714 jiwa, dan Gelandangan Pengemis (OT) sebanyak 93 jiwa. Realisasi pada tahun 2023 adalah 100% dengan capaian 100%.

c. Pada tahun 2024 target kinerja tetap yaitu 100% dan realisasinya adalah 100% dengan rinciannya yaitu populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis berjumlah 382 jiwa yang terdiri dari : penyandang disabilitas terlantar sebanyak 212 jiwa, anak terlantar 6 jiwa, lanjut usia terlantar 108 jiwa, dan Gelandangan Pengemis (OT) sebanyak 56 jiwa. Dan capaian kinerja 100%.

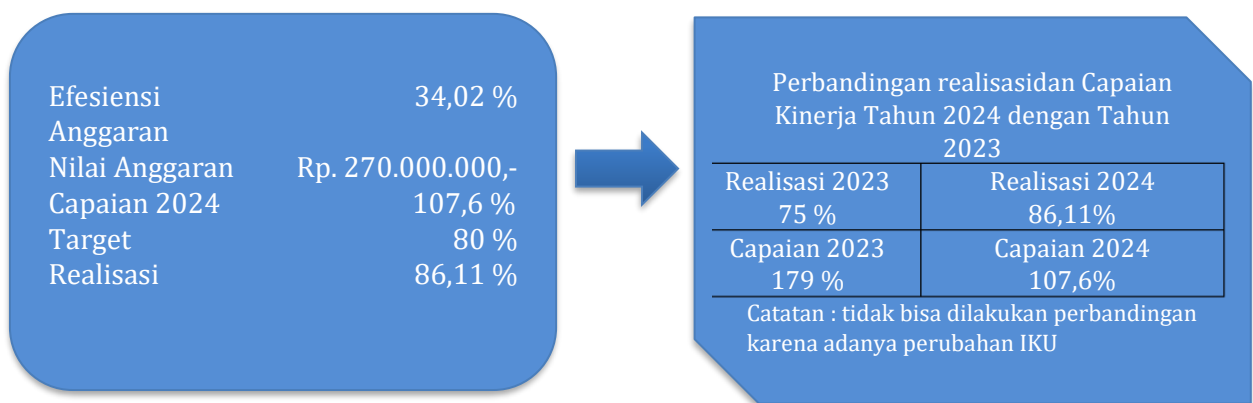


a. Indikator Kinerja Utama yang ke dua adalah Persentase Kelurahan Cepat Berkembang, berbeda dengan Indikator Kinerja Utama yang sebelumnya pada tahun 2022 dan 2023 dan memiliki target yang berbeda pula. IKU sebelumnya adalah Persentase pengentasan desa/kelurahan tertinggal (kurang berkembang), dengan target ditahun 2022 sebesar 47%, berasal dari perhitungan jumlah desa/kelurahan tertinggal yang memenuhi kriteria desa/kelurahan berkembang

2 per tahun berdasarkan indeks desa /kelurahan membangun per tahun dibagi dengan jumlah desa/kelurahan tertinggal (kurang berkembang) per awal tahun n dikali 100%. Perhitungan ini berpedoman pada Permendagri nomor 18 tahun 2020 hal. 143 tentang Laporan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pada tahun 2022 jumlah desa/kelurahan tertinggal (kurang berkembang) per awal tahun n yaitu 26 kelurahan dan jumlah desa/kelurahan tertinggal yang memenuhi kriteria desa/kelurahan berkembang per tahun berdasarkan indeks desa /kelurahan membangun per tahun sebanyak 19 kelurahan. Realisasi pada tahun 2022 adalah 73% dengan capaian 155%.

b. Pada tahun 2023 target kinerja berubah yaitu 42% dan realisasinya adalah 75% dan capaian kinerja 179% dengan rinciannya yaitu jumlah desa/kelurahan tertinggal (kurang berkembang) per awal tahun n yaitu 8 kelurahan dan jumlah desa/kelurahan tertinggal yang memenuhi kriteria desa/kelurahan berkembang per tahun berdasarkan indeks desa /kelurahan membangun per tahun sebanyak 6 kelurahan.

c. Pada tahun 2024, Indikator Kinerja Utama (IKU) nya berbeda dengan tahun 2022 dan 2023 yaitu Persentase Kelurahan Cepat Berkembang. Di tahun 2024 target kinerja 80% dan realisasinya adalah 86,11% dengan rinciannya yaitu populasi atau jumlah kelurahan sebanyak 36 kelurahan dan jumlah kelurahan yang cepat berkembang sebanyak 31 kelurahan. Dan capaian kinerja 107,6%.

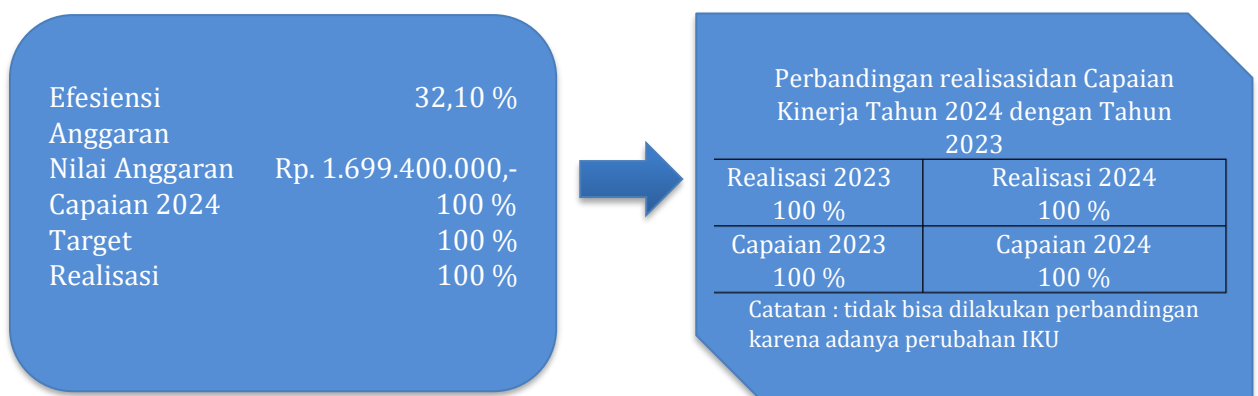


3. **a.** Indikator Kinerja Utama yang ke tiga adalah Persentase PKK Aktif, berbeda dengan Indikator Kinerja Utama yang sebelumnya pada tahun 2022 dan 2023 namun mempunyai target yang sama yaitu 100%. IKU sebelumnya adalah Persentase LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) berprestasi/aktif, dengan target tahun 2022 adalah 100%, berasal dari perhitungan jumlah LPM berprestasi dibagi dengan jumlah

LPM dikali 100%. Perhitungan ini berpedoman pada Permendagri nomor 86 tahun 2017 hal.222 tentang Tata Cara Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah. Pada tahun 2022 jumlah LPM 36 dan jumlah LPM yang berprestasi/aktif 36 LPM.Realisasi pada tahun 2022 adalah 100% dengan capaian 100%.

b. Pada tahun 2023 target kinerja tetap yaitu 100% dan realisasinya adalah 100% dan capaian kinerja 100% dengan rinciannya yaitu jumlah LPM 36 dan jumlah LPM yang berprestasi/aktif sebanyak 36 LPM.

c. Pada tahun 2024, Indikator Kinerja Utama (IKU) nya berbeda dengan tahun 2022 dan 2023 yaitu Persentase PKK Aktif. Ditahun 2024 target kinerja 100% dan realisasinya adalah 100% dengan rinciannya yaitu populasi atau jumlah PKK sebanyak 588 PKK dan jumlah PKK yang aktif sebanyak 588 PKK.Dan capaian kinerja 100%.

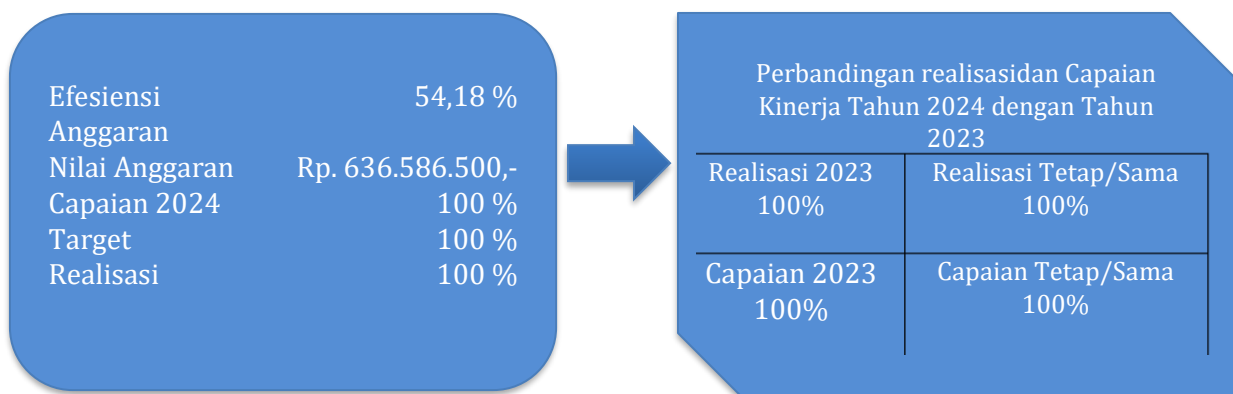


4. a. Indikator Kinerja Utama yang ke empat adalah Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota, berasal dari perhitungan Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran dibagi dengan Populasi korban bencana alam dan sosial didaerah kab/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat daerah kab/kota dikali 100%. Perhitungan ini berpedoman pada Permendagri nomor 59 tahun 2021 dan Permensos nomor 9 tahun 2018 yaitu terkait Penerapan Teknis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal. Pada tahun 2022 populasi korban bencana alam dan sosial didaerah kab/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat daerah kab/kota berjumlah 267 jiwa yaitu yang terdiri dari : korban bencana

alam sebanyak 123 jiwa dan korban bencana sosial 144 jiwa. Realisasi pada tahun 2022 adalah 100%, dengan capaian 100%.

b. Pada tahun 2023 target kinerja tetap yaitu 100% dan realisasinya adalah 100% dan capaian kinerja 100% dengan rinciannya yaitu populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kab/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat daerah kab/kota berjumlah 468 jiwa yaitu yang terdiri dari : korban bencana alam sebanyak 246 jiwa dan korban bencana sosial 222 jiwa.

c. Pada tahun 2024 target kinerja tetap yaitu 100% dan realisasinya adalah 100% dan capaian kinerja 100% dengan rinciannya yaitu populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kab/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat daerah kab/kota berjumlah 317 jiwa yaitu yang terdiri dari : korban bencana alam sebanyak 4 jiwa dan korban bencana sosial 313 jiwa.

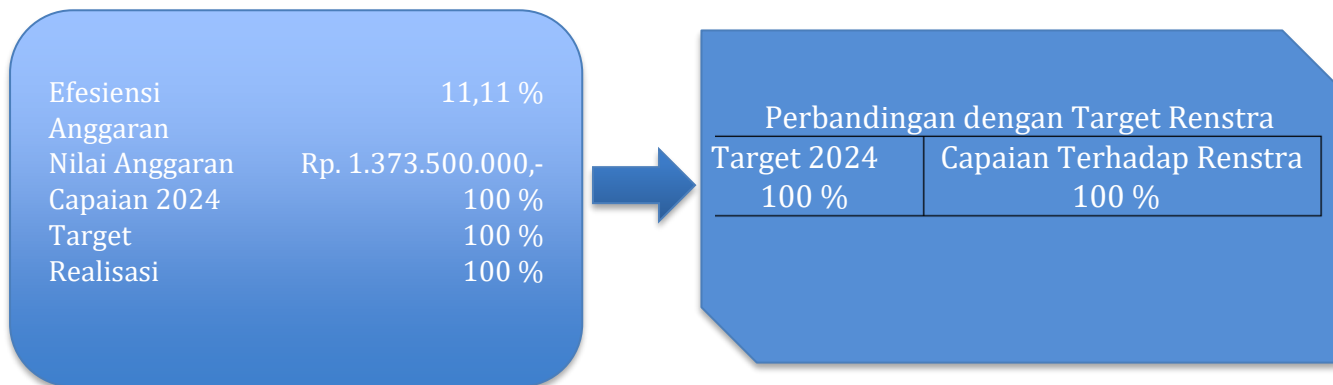


3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2024 sampai dengan periode Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 yaitu:

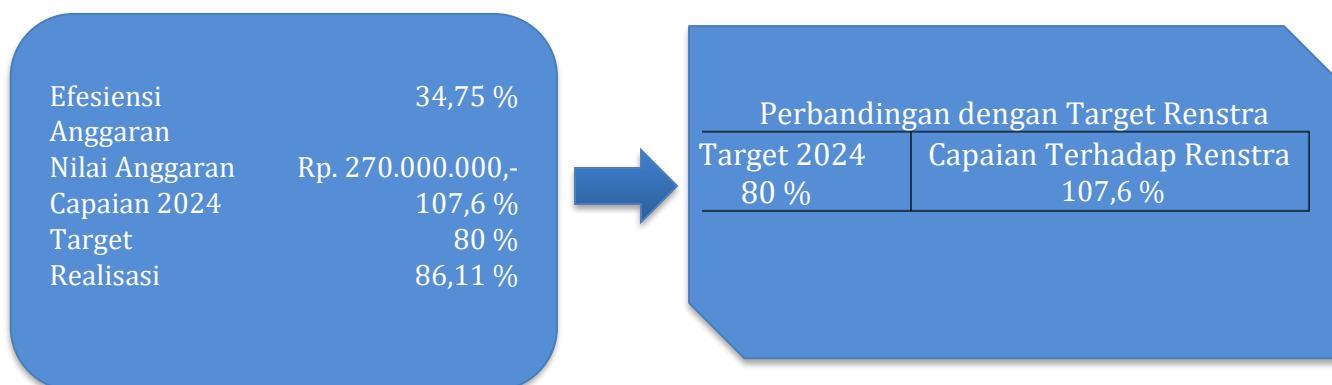
1. Indikator Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.

Pada perencanaan lima tahunan, capaian Indikator Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti tahun 2024 terealisasi 100% sudah sesuai dari target Renstra sebesar 100%.



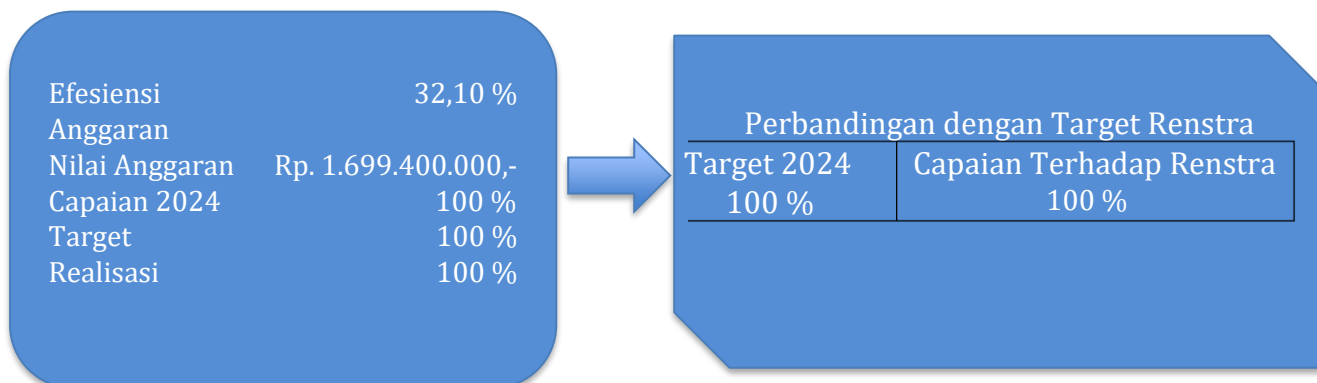
2. Indikator Persentase Kelurahan Cepat Berkembang.

Pada perencanaan lima tahunan, capaian Indikator Persentase Kelurahan Cepat Berkembang tahun 2024 sudah melebihi dari target akhir Renstra yaitu sebesar 6,11% dari target Renstra sebesar 80% dan terealisasi 86,11% pada tahun 2024.



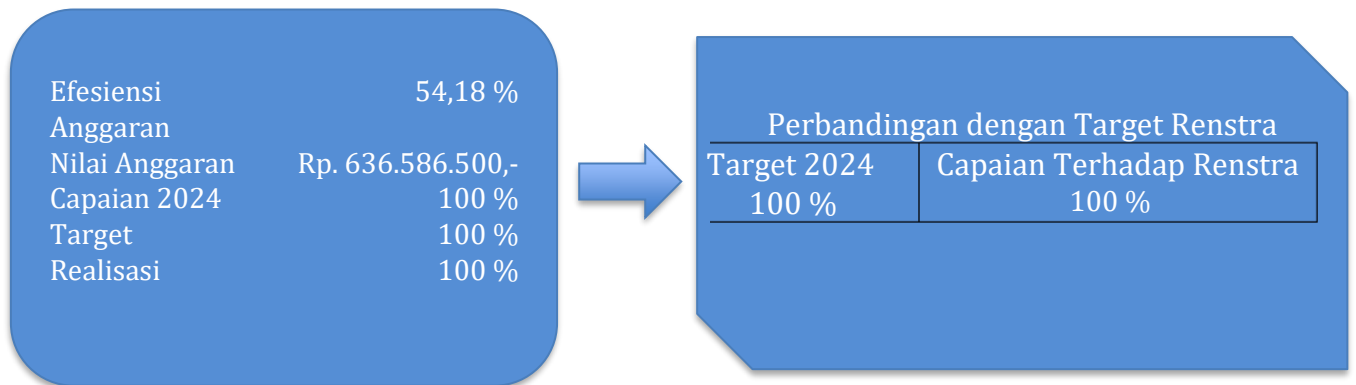
3. Indikator Persentase PKK Aktif.

Pada perencanaan lima tahunan, capaian Indikator Persentase PKK Aktif tahun 2024 terealisasi 100% sudah sesuai dari target Renstra sebesar 100%.



4. Indikator Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota.

Pada perencanaan lima tahunan, capaian Indikator Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota tahun 2024 terealisasi 100% sudah sesuai dari target Renstra sebesar 100%.



3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional (Target SPM)

Bersama ini kami sajikan perbandingan realisasi kinerja dengan standar Nasional (Target SPM) sebagaimana tabel 3.4.1 berikut :

Tabel 3.4.1
Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2024	REALISASI NASIONAL (tahun 2023)	KETERANGAN
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	83,38%	- Tahun 2024 Realisasi SPM Nasional belum di rilis oleh Kemendagri. - Tahun 2023 realisasi kinerja /SPM dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai mencapai 100%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi

2	Meningkatnya Penanggulangan Korban Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kab/Kota	100%		Nasional sebesar 16,62%.
---	--	---	------	--	--------------------------

3.5 Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi

a. Indikator Indikator Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.

a. Capaian kinerja untuk indikator Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti menunjukkan capaian yang tetap. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 100 % realisasi sebesar 100 %, tercapai 100 % atau bernilai kinerja ≥ 90 (sangat tinggi). Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 100 % atau tercapai sebesar 100 %, maka capaian tahun 2024 tetap (sama dengan pencapaian tahun 2023).

b. Faktor pendukung/pendorong capaian indikator Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sesuai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut :

- Adanya koordinasi antar Instansi terkait;
- Akses pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mudah dijangkau.

c. Faktor penghambat Capaian Indikator Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti adalah sebagai berikut:

- Terbatasnya SDM Pendamping Pelayanan PPKS;
- Minimnya sarana dan prasarana pendukung Pelayanan PPKS.

d. Tindak lanjut Capaian Indikator Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi

kebutuhan dasarnya di luar panti adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM Pendamping;
- Membuat usulan program dan kegiatan yang mendukung termasuk kebutuhan sarana dan prasarana.

2. Indikator Persentase Kelurahan Cepat Berkembang.

- a. Capaian kinerja untuk indikator Persentase Kelurahan Cepat Berkembang menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 80% realisasi sebesar 86,11% tercapai 107,6% atau bernilai kinerja ≥ 90 (sangat tinggi). Tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 karena berbeda indikator dan target.
 - b. Faktor pendukung/pendorong capaian indikator Persentase Kelurahan Cepat Berkembang melebihi target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
 - SDM yang tersedia;
 - Sarana dan Prasarana yang ada.
 - c. Faktor penghambat Capaian Indikator Persentase Kelurahan Cepat Berkembang adalah sebagai berikut:
 - Kinerja SDM yang kurang optimal;
 - Lokasi kelurahan yang jauh, akses yang sulit dan jaringan internet yang tidak bagus.
 - d. Tindak lanjut Capaian Indikator Persentase Kelurahan Cepat Berkembang adalah sebagai berikut:
 - Pembinaan yang dilakukan dengan cara Monitoring dan Evaluasi kegiatan;
- Pemberian Reward (Penghargaan) dan Punishment.

3. Indikator Persentase PKK Aktif.

- a. Capaian kinerja untuk indikator Persentase PKK Aktif menunjukkan capaian yang tetap. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 100% realisasi sebesar 100% tercapai 100% atau bernilai kinerja ≥ 90 (sangat tinggi). Tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 karena berbeda indikator namun memiliki target yang sama.
 - b. Faktor pendukung/pendorong capaian indikator Persentase PKK Aktif sesuai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
 - SDM yang tersedia;
- Sarana dan Prasarana yang ada.
- c. Faktor penghambat Capaian Indikator Persentase PKK Aktif adalah sebagai

berikut:

- Kinerja SDM yang kurang optimal;
- Fungsi kepengurusan organisasi kelembagaan belum berjalan optimal.

d. Tindak lanjut Capaian Indikator Persentase PKK Aktif adalah sebagai berikut:

- Pembinaan yang dilakukan dengan cara Monitoring dan Evaluasi (Monev) kegiatan;

- Pemberian Reward (Penghargaan) dan Punishment.

4. Indikator Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota.

a. Capaian kinerja untuk indikator Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota menunjukkan capaian yang tetap. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 100%, realisasi sebesar 100%, tercapai 100% atau bernilai kinerja ≥ 90 (sangat tinggi).

Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 100% atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2024 tetap (sama dengan pencapaian tahun 2023).

b. Faktor pendukung/ pendorong capaian indikator Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota sesuai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut :

- Dukungan dan komitmen dari Pemerintah Daerah dan Provinsi dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam dan sosial;
- Adanya jejaring /kemitraan antar OPD dan organisasi masyarakat dalam bentuk penanganan atas kebutuhan bagi korban bencana alam dan sosial.

c. Faktor penghambat Capaian Indikator Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota adalah sebagai berikut :

- Perubahan kondisi lingkungan yang semakin menurun kualitasnya sehingga berdampak pada meningkatnya ancaman risiko bencana;
- Belum terpenuhinya sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang lengkap dan berkualitas.

d. Tindak lanjut Capaian Indikator Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota adalah sebagai berikut:

- Kolaborasi bersama OPD Teknis terkait dalam meminimalisir terjadinya bencana pada

titik-titik wilayah yang rawan akan terjadinya bencana;

- Melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan penyaluran bantuan bagi korban bencana alam dan sosial.

3.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6.1

.Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No.	IKU	sasaran Program	indikator Program	Nama Program	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Satuan	Anggaran (Rp)	realisasi (Rp)	capaian anggaran (%)
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.	Meningkatnya Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (indikator spm)	Rehabilitasi sosial.	100	100	%	1.373.500.000	1.220.878.592	88,89%
			Persentase (%) potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kab/kota yang diberdayakan	Program pemberdayaan sosial.	100	100	%	921.946.460	782.308.700	84,85%
			Persentase (%) pmks yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Program perlindungan dan jaminan sosial.	100	100	%	17.218.454.500	8.695.792.900	50,50%

			Persentase (%) warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di daerah kab/kota ke desa/kelurahan asal	Program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	100	100	%	10.000.000	5.650.000	56,50%
			Persentase (%) pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kab/kota	Program pengelolaan taman makam pahlawan.	100	100	%	40.054.700	34.806.400	86,90%
2	Persentase Kelurahan Cepat Berkembang	Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Kelurahan yang Tertib Administrasi Pemerintahan	Program administrasi pemerintahan desa.	100	100	%	270.000.000	176.163.687	65,25%
3	Persentase PKK Aktif	Desa/Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) yang aktif	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga Adat dan masyarakat hukum adat.	100	100	%	1.699.400.000	1.153.937.498	67,90%
4	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota	Meningkatnya Penanggulangan Korban Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota	Program Penanganan Bencana	100	100	%	636.586.500	291.689.600	45,82%

3.7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.7.1**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti.	100%	88,89%
2	Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan.	Persentase Kelurahan Cepat Berkembang	107,6%	65,25%
		Persentase PKK Aktif	100%	67,90%
3	Meningkatnya Penanggulangan Korban Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota	100%	45,82%

Berdasarkan table diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut::

- a. Pada Indikator Kinerja Utama pertama yaitu Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti, tingkat efisiensinya adalah 1,12% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (88,89%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;
- b. Pada Indikator Kinerja Utama kedua yaitu Persentase Kelurahan Cepat Berkembang tingkat efisiensinya adalah 1,65% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (107,6%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (65,25%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;
- c. Pada Indikator Kinerja Utama ketiga yaitu Persentase PKK Aktif tingkat efisiensinya adalah 1,47% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (67,90%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;

- d. Pada Indikator Kinerja Utama keempat yaitu Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota tingkat efisiensinya adalah 2,18% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (45,82%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**.

3.8 Prestasi dan Penghargaan

Pada tahun 2024 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai mendapatkan penghargaan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.8.1

Prestasi dan Penghargaan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2024

No	Jenis Penghargaan	Prestasi	Tingkat	Diberikan Oleh
1	Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Zona Hijau (Kualitas Tertinggi)	-	Ombudsman RI Provinsi Riau
2	Lomba Penilaian Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Terbaik Tingkat Provinsi Riau	Juara I	Provinsi Riau	Pj. Gubernur Riau
3	Lomba Desa dan Kelurahan	Juara I	Provinsi Riau	Pj. Gubernur Riau
4	Kegiatan Festival Pangan Lokal /Lomba Cipta Menu	Juara I	Provinsi Riau	Kepala Dinas Pangan Tanaman dan Hortikultura Prov. Riau
5	Lomba Inovasi TTG	Juara II	Provinsi Riau	Pj. Gubernur Riau
6	Jasa-jasa dalam Membina Pengembangan Teknologi Tepat Guna di Daerah 2023-2024	-	Se-Nasional	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI

GAMBAR 3.8.1
PENGHARGAAN





B. REALISASI ANGGARAN

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang tercantum pada perjanjian kinerja perubahan tahun 2024. Adapun Anggaran per Sasaran tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Ringkasan Anggaran dan realisasi Tahun 2024

Uraian Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan		Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.126.209.060	82,94%
	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.900.000	56,15%
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.100.000	95,21%
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.100.000	95,00%
	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.100.000	0,00%
	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.100.000	95,14%
	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.100.000	0,00%
	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	6.300.000	73,33%
	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.100.000	0,00%
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.502.549.760	96,24%
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.498.499.760	96,24%
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.950.000	100,00%
	3 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.100.000	95,14%
	3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	24.300.000	83,33%
	1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24.300.000	83,33%
	4 Administrasi Kepegawaiian Perangkat Daerah	4.000.000	100,00%
	1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4.000.000	100,00%
	5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	405.998.200	67,54%
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.246.000	94,43%
	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63.314.100	97,45%
	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.057.100	94,03%
	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.247.600	57,22%
	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.821.000	52,92%
	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.830.000	39,05%
	7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	271.482.400	63,27%

	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	801.202.700	21,42%
		1 Pengadaan Mebel	484.520.000	0,00%
		2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	316.682.700	54,20%
	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.050.351.040	86,51%
		1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	100,00%
		2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	87.369.000	76,11%
		3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	961.482.040	87,43%
	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	318.907.360	58,90%
		1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.000.000	91,43%
		2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	149.957.360	86,18%
		3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.550.000	93,19%
		4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	105.400.000	0,00%
2		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	921.946.460	84,85%
	1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	921.946.460	84,85%
		1 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	618.764.240	81,44%
		2 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	44.644.320	94,84%
		3 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	108.537.900	79,28%
		4 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	150.000.000	100,00%
3		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	10.000.000	56,50%
	1	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten n/Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal	10.000.000	56,50%
		1 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	10.000.000	56,50%

4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		1.373.500.000	88,89%
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		1.373.500.000	88,89%
	1	Penyediaan Permakanan	603.500.000	88,98%
	2	Penyediaan Sandang	30.000.000	100,00%
	3	Penyediaan Alat Bantu	165.000.000	81,64%
	4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	30.000.000	54,98%
	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	250.000.000	93,00%
	6	Pemberian Layanan Kedaruratan	100.000.000	91,16%
	7	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	25.000.000	85,00%
	8	Pemberian Layanan Rujukan	170.000.000	92,90%
5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		17.218.454.500	50,50%
1	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		104.940.500	8,42%
	1	Perjangkauan Anak-Anak Terlantar	48.410.500	0,00%
	2	Rujukan Anak-Anak Terlantar	27.180.000	12,99%
	3	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	29.350.000	18,09%
2	Pengeolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		17.113.514.000	50,76%
	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	42.520.000	29,43%
	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	74.000.000	43,28%
	3	Fasilitasi bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	16.996.994.000	50,85%
6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		636.586.500	45,82%
1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		209.309.500	45,12%
	1	Penyediaan Makanan	109.309.500	35,57%
	2	Penyediaan Sandang	50.000.000	76,82%
	3	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	50.000.000	34,29%
2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		427.277.000	46,17%
	1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	50.000.000	27,54%
	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	377.277.000	48,63%
7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		40.054.700	86,90%
1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		40.054.700	86,90%
	1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	40.054.700	86,90%

8	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	270.000.000	65,25%
1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	270.000.000	65,25%
	1 Fasilitas Penyusunan Profil Desa	170.000.000	50,37%
	2 Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	100.000.000	90,53%
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.699.400.000	67,90%
1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.699.400.000	67,90%
	1 Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1.099.400.000	62,08%
	2 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	150.000.000	86,29%
	3 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	50.000.000	83,32%
	4 Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	100.000.000	90,42%
	5 Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	100.000.000	96,78%
	6 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	100.000.000	51,97%
	7 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100.000.000	61,20%
		29.296.151.220	62,37%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (**LKIP**) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun Anggaran 2024 merupakan uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai pada tahun anggaran 2024. Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban kepada publik terhadap kinerja atau hasil yang telah dicapai serta upaya Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dalam mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik, terpercaya dan akuntabel.

Meskipun secara umum Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai telah melaksanakan program dan kegiatannya dengan baik, namun demikian bukan berarti dalam pelaksanaannya tidak ada permasalahan, hambatan maupun kekurangan baik yang bersifat khusus dan teknis. Adapun permasalahan atau kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya jumlah staf Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai pelaksana teknis;
2. Sarana dan Prasarana serta SDM dalam pelayanan kepada PPKS masih minim;
3. Keterbatasan anggaran;
4. Perlunya pengembangan sumber daya Pegawai dan kerjasama serta Koordinasi pelaksanaan Kegiatan;
5. Belum optimalnya realisasi anggaran disebabkan Ketidakstabilan Anggaran Daerah sehingga mengakibatkan terjadinya Tunda Bayar (Terutang) terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Kondisi ini sangat berpengaruh pada realisasi atau serapan anggaran disetiap kegiatan.

Dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai masih diperlukan perbaikan dari berbagai bidang untuk meningkatkan kinerja yang telah dicapai. Dalam mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai, diharapkan adanya kerjasama dan saling pengertian antara berbagai pihak yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat antara lain dalam bentuk:

1. Perlu adanya dukungan dana yang memadai agar program dan sasaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik dan terarah.

2. Evaluasi kegiatan dalam hal pencapaian keluaran, hasil dan manfaat serta pencapaian terhadap kelompok sasaran.
3. Diperlukan adanya peningkatan dalam sistem pengumpulan data sehingga setiap hasil/outcome dari kegiatan atau program yang dilaksanakan dapat terlihat dan tergambar dalam setiap laporan hasil kegiatan/program yang akhirnya tercantum dalam laporan pertanggungjawaban kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai.
4. Monitoring secara terus menerus untuk melihat progres dari capaian kegiatan yang dilaksanakan.
5. Untuk meningkatkan prestasi kerja diperlukan penambahan fasilitas kerja antara lain fasilitas komputer disetiap Bidang dan Bagian, serta penambahan jumlah pegawai yang saat ini masih dirasakan kurang.

Dengan adanya upaya-upaya pemecahan masalah tersebut diharapkan permasalahan yang sama tidak akan muncul di tahun-tahun mendatang sehingga capaian kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai akan meningkat.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam LKIP Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2024, semoga dapat memberikan gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai. Dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi dan memberikan petunjuk, sehingga kita senantiasa memiliki kekuatan dan kemampuan yang tulus dan ikhlas dalam sama-sama membangun Kota Dumai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Daerah menuju peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Kota Dumai, Januari 2025

KEPALA DINAS SOSIAL DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA
DUMAI



drg. HERMIYATI

Pembina Utama Muda

Nip. 19711229 200012 2 001

LAMPIRAN
MATRIK RENCANA STRATEGIS
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI
TAHUN 2021-2026

Visi	: Meningkatkan kapasitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan
Misi I	: "Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing dan Bertumpu Pada Kepelabuhan dan Industri"
Misi IV	: "Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik"
Sasaran	: Meningkatkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial
	: Meningkatkan kapasitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan
	: Meningkatkan penanggulangan korban bencana

No	TUJUAN									SASARAN								Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran			Ket							
	Uraian	Indikator	Kondisi Awal		Target					Uraian	Indikator	Formulasi Perhitungan	Kondisi Awal		Target					Strategi		Kebijakan	Program					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026									
1	Meningkatkan kesejahteraan sosial	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	N/A	N/A	100	100	100	100	100	Meningkatnya penyelenggara kesejahteraan sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator spm)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti $\frac{\text{Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti}}{\text{Total penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti}} \times 100\%$	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100	Meningkatkan Perindungan Sosial	1. Meningkatkan pelayanan dasar bagi warga miskin 2. Meningkatkan jaminan sosial bagi masyarakat yang mempunyai masalah kesejahteraan sosial	Program rehabilitasi sosial					
2	Meningkatkan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan	Nilai evaluasi perkembangan Desa & Kelurahan (Epteskel)	N/A	N/A	>201-350	>201-350	>201-350	>351	>351	Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan	Persentase pengentasan Desa/Kelurahan tertinggal (kurang berkembang)	Jumlah kecamatan/kelurahan tertinggal yang merupakan kelurahan desa/kelurahan berkembang yang telah selesai atau sedang dalam proses pembangunan $\frac{\text{Jumlah kecamatan/kelurahan tertinggal yang merupakan kelurahan desa/kelurahan berkembang yang telah selesai atau sedang dalam proses pembangunan}}{\text{Total kecamatan/kelurahan tertinggal}} \times 100\%$	N/A	N/A	47	42	-	-	-				Program administrasi pemerintah Desa/ Kelurahan					
										Persentase Kelurahan Cepat Berkembang	Jumlah Kelurahan Cepat Berkembang $\frac{\text{Jumlah Kelurahan Cepat Berkembang}}{\text{Jumlah Kelurahan}} \times 100\%$					80	90	100										
										Persentase LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat berprestasi/aktif)	Jumlah LPM berprestasi/aktif $\frac{\text{Jumlah LPM berprestasi/aktif}}{\text{Jumlah LPM}} \times 100\%$	N/A	N/A	100	100	-	-	-				Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat						
										Persentase PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) Aktif	Jumlah PKK Aktif $\frac{\text{Jumlah PKK Aktif}}{\text{Jumlah PKK}} \times 100\%$					100	100	100				Program Penanggulangan Bencana						
3	Meningkatnya Penanggulangan Korban Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota	100	100	100	100	100	100	Meningkatnya Penanggulangan Korban Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota $\frac{\text{Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota}}{\text{Total korban bencana alam dan sosial}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1. Mengoptimalkan upaya penanganan saat kejadian bencana 2. Mengoptimalkan upaya penanganan pasca kejadian bencana	1. Menyelenggarakan penanggulangan bencana yang terintegrasi dan lintas sektoral 2. Meningkatkan koordinasi penanganan bagi masyarakat terdampak bencana	Program Penanggulangan Bencana	

Kepala
Dinas Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat

drg. HERMIYATI
NIP. 19711229 200012 2 001

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100%
2	MENINGKATNYA KAPASITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN	Persentase Kelurahan Cepat Berkembang	%	80%
		Persentase PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)	%	100%
3	MENINGKATNYA PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kab/Kota	%	100%

Kepala Dinas Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai,



drg. HERMIYATI

Pembina Utama Muda

Nip. 19711229 200012 2 001

PERJANJIAN KINERJA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI TAHUN 2024



PERJANJIAN KINERJA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RINO PARLINDUNGAN, ST, MT
 Jabatan : SEKRETARIS DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKA KOTA DUMAI
 Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*
 Nama : drg. HERMIYATI
 Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI

Selaku atasan langsung *Pihak Pertama*


Selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab *Pihak Pertama*.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

 drg. HERMIYATI
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19741229 200012 2 001

Dumai, 2024
 Pihak Pertama

 RINO PARLINDUNGAN, ST, MT
 Pembina Tk.I
 NIP. 19731116 200003 1 001

Lampiran Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan 2024
1	Tersusunnya Dokumen/Laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	12
2	Tersusunnya Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	4
3	Tersusunnya Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	2
4	Tersusunnya Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	1
5	Tersusunnya Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	2
6	Tersedianya Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	unit	35
7	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	6
8	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	unit	61

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.715.592.440
1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 18.900.000
1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 3.989.562.340

1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp	18.200.000
1.4 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp	11.000.000
1.5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	283.043.600
1.6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	145.507.900
1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	1.051.071.240
1.8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	200.307.360

JUMLAH Rp 5.715.592.440

Dumai, Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala,



drg. HERMIYATI

NIP. 19711229 200012 2 001

Pihak Pertama
Sekretaris,



RINO PARLINDUNGAN, ST, MT

NIP. 19731116 200003 1 001



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NOVIA ANDRIANI, S.Kep, M.Si**

Jabatan : **KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL**

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : **drg. HERMIYATI**

Jabatan : **KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA DUMAI**

Selaku atasan langsung *Pihak Pertama*

Selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab *Pihak Pertama*.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 2024

Pihak Pertama



NIP. 19711229 200012 2 001

NOVIA ANDRIANI, S.Kep, M.Si

Pembina

NIP. 19781126 200501 2 003

Lampiran Perjanjian Kinerja

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan
				2024
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarisasi di Daerah Kabupaten/Kota ke Desa/ Kelurahan Asal	%	100
		Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarisasi di Daerah Kabupaten/Kota ke Desa/ Kelurahan Asal	%	100
		Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarisasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10
2	Terpenuhinya kebutuhan dasar Disabilitas Tertantar, Anak Tertantar, Lanjut Usia Tertantar, serta Gelandangan	Persentase Penyandang Disabilitas Tertantar, Anak Tertantar, Lanjut Usia Tertantar, serta Gelandangan Pengemis yang tertangani di Luar Panti Sosial	%	100
		Persentase Disabilitas Tertantar, Anak Tertantar, Lanjut Usia Tertantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	%	100
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemukiman Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100
		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
1. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp 10.000.000
1.1 Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarasal di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Rp 10.000.000
1.1.1 Sub Kegiatan Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarasal di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Rp 10.000.000
2. Program Rehabilitasi Sosial	Rp 805.000.000
2.1 Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rp 805.000.000
2.1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Pemakanan	Rp 100.000.000
2.1.2 Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Rp 30.000.000
2.1.3 Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Rp 100.000.000
2.1.4 Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Rp 30.000.000
2.1.5 Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Rp 250.000.000
2.1.6 Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	Rp 100.000.000
2.1.7 Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Rp 25.000.000
2.1.8 Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Rp 170.000.000
JUMLAH	Rp 815.000.000

Dumai, Januari 2024

Pihak Pertama
Kabid Rehabilitasi Sosial


NOVIA ANDRIANI, S.Kep., M.Si
NIP. 19781126 200501 2 003





**PERJANJIAN KINERJA
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **TENGGU SA'ADIAH, SH**

Jabatan : **JF. PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA**

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : **NOVIA ANDRIANI, S.Kep, M.Si**

Jabatan : **KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL**

Selaku atasan langsung *Pihak Pertama*

Selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab *Pihak Pertama*.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

NOVIA ANDRIANI, S.Kep, M.Si
Pembina
NIP.19781126 200501 2 003

Dumai, 2024

Pihak Pertama

TENGGU SA'ADIAH, SH
Ketata Tk. I
NIP.19730703 200112 2 001

Lampiran Perjanjian Kinerja

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan
				2024
1	Terlaksananya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa /Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10
2	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100

Dumai, Januari 2024

Pihak Kedua
Kabid Rehabilitasi Sosial

NOVIA ANDRIANI, S.Kep, M.Si
NIP. 19781126 200501 2 003

Pihak Pertama
JF. Penyuluh Sosial
Ahli Muda

TENGGU SA'ADIAH, SH
NIP. 19730703 200112 2 001



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DIAN EKAWATI, S.IP

Jabatan : JF. PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : NOVIA ANDRIANI, S.Kep, M.SI

Jabatan : KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL

Selaku atasan langsung *Pihak Pertama*

Selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab *Pihak Pertama*.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

NOVIA ANDRIANI, S.Kep, M.SI
Pembina
NIP.19781126 200501 2 003

Dumai, 2024

Pihak Pertama

DIAN EKAWATI, S.IP
Penata Tk.I
NIP.19800910 200604 2 018



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JULIADI, S.Kep, M.IP

Jabatan : KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : drg. HERMIYATI

Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI

Selaku atasan langsung *Pihak Pertama*

Selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab *Pihak Pertama*.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

drg. HERMIYATI
Dokter Gigi Lama Muda
NIP.19714229 200012 2 001

Dumai, 2024

Pihak Pertama

JULIADI, S.Kep, M.IP
Penata Tk.I
NIP.19790721 199803 1 001

Lampiran Perjanjian Kinerja

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan
				2024
1	2	3	4	5
1	Terperuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100
2	Terperuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100
3	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100
4	Terperuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100
5	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100

Dumai, Januari 2024

Pihak Kedua
Kabid Rehabilitasi Sosial

NOVIA ANDRIANI, S.Kep, M.SI
NIP. 19781126 200501 2 003

Pihak Pertama
JF. Penyuluh Sosial
Ahli Muda

DIAN EKAWATI, S.IP
NIP. 19800910 200604 2 018

Lampiran Perjanjian Kinerja

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan
				2024
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya Pemeliharaan terhadap anak tertantar yang dipelihara	Persentase pmtk yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	100
		Persentase anak tertantar yang dipelihara	%	100
		Jumlah Anak-Anak Tertantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10
		Jumlah Anak-Anak Tertantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10
2	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Tertantar yang Terpapar dan Terpelihara	Orang	10
		Persentase fakir miskin cakupan daerah kab/kota yang terdeta	%	100
		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	135.761
		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	30.530
3	Terperuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	2.696
		Persentase korban bencana alam dan sosial kab/kota yang tertangani	%	100
		Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	%	100
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	150
4	Terlaksananya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Orang	15
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	150
4	Terlaksananya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota	Persentase Masyarakat yang diberdayakan terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	%	100

	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung	1
	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Tanura Siaga Bencana Kewenangan	Orang	46

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 10.042.639.000
1.1 Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Tertarant	Rp 150.000.000
1.1.1 Sub Kegiatan Penjangkauan Anak- Anak Tertarant	Rp 50.000.000
1.1.2 Sub Kegiatan Rujukan Anak-Anak Tertarant	Rp 50.000.000
1.1.3 Sub Kegiatan Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Tertarant	Rp 50.000.000
1.2 Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 9.892.639.000
1.2.1 Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 100.000.000
1.2.1 Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 74.000.000
1.2.2 Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Rp 9.718.639.000
2. Program Penanganan Bencana	Rp 627.277.000
2.1 Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Rp 150.000.000
2.1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Rp 50.000.000
2.1.2 Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Rp 50.000.000
2.1.3 Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Rp 50.000.000
2.2 Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kelelapagaan Bencana Kabupaten/Kota	Rp 477.277.000
2.2.1 Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Rp 100.000.000
2.2.2 Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Tanura Siaga Bencana	Rp 377.277.000

JUMLAH 10.669.916.000

Dumai, Januari 2024

Pihak Pertama
Kabid Perlindungan Dan Jaminan Sosial
[Signature]
JULIADI, S.Kep. M.I.P
NIP. 19790721 199803 1 001



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KARTINI SARI DEWI, S.PI, M.Si

Jabatan : JF. PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : JULIADI, S.Kep. M.I.P

Jabatan : KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Selaku atasan langsung *Pihak Pertama*

Selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab *Pihak Pertama*.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 2024
Pihak Pertama

Pihak Kedua
[Signature]
JULIADI, S.Kep. M.I.P
Penata TK.I
NIP.19790721 199803 1 001

[Signature]
KARTINI SARI DEWI, S.PI, M.Si
Penata TK.I
NIP.19840421 201001 2 043

Lampiran Perjanjian Kinerja

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan
				2024
1	2	3	4	5
1	Tertelaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	135.761
2	Tertelaksananya Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	30.530

Dumai, Januari 2024

Pihak Kedua
Kabid Perlindungan Dan Jaminan Sosial
[Signature]
JULIADI, S.Kep. M.I.P
NIP. 19790721 199803 1 001

Pihak Pertama
JF. Penyuluh Sosial Ahli Muda
[Signature]
KARTINI SARI DEWI, S.PI, M.Si
NIP. 19840421 201001 2 043



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : GAZALI TAUHID AL DJAMHUR, A.Md

Jabatan : JF. PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : JULIADI, S.Kep, M.IP

Jabatan : KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Selaku atasan langsung *Pihak Pertama*

Selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab *Pihak Pertama*.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lampiran Perjanjian Kinerja

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI**

No	Sasaran	Indikator Kegiatan	Setuan	Target Tahunan 2024
1	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	150
2	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakailan dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakailan dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	150
3	Tertaksananya Pelaksanaan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung	1
4	Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	46

Dumai, Januari 2024

Pihak Kedua
Kabid Perlindungan
Dari Jaminan Sosial

JULIADI, S.Kep, M.IP
NIP. 19790721 199803 1 001

Pihak Pertama
JF. Penyuluh Sosial
Ahli Muda

GAZALI TAUHID AL DJAMHUR, A.Md
NIP. 19710419 200604 1 003

Pihak Kedua

JULIADI, S.Kep, M.IP
Penata TK.1
NIP.19790721 199803 1 001

Dumai, 2024

Pihak Pertama

GAZALI TAUHID AL DJAMHUR, A.Md
Penata
NIP.19710419 200604 1 003



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ALEX MARTHIN, SH, MH

Jabatan : JF. PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : JULIADI, S.Kep, M.IP

Jabatan : KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Selaku atasan langsung *Pihak Pertama*

Selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab *Pihak Pertama*.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Lampiran Perjanjian Kinerja

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan 2024
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya Penjangkauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10
2	Terlaksananya Rujukan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10
3	Terlaksananya Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10
4	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	2.696
5	Terperuhnya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	150

Dumai, Januari 2024

Pihak Kedua
Kabid Perlindungan
Dan Jaminan Sosial


JULIADI, S.Kep, M.IP
NIP. 19790721 199803 1 001

Pihak Pertama
JF. Penyuluh Sosial
Ahli Muda


ALEX MARTHIN, SH, MH
NIP. 19820503 201503 1 001

Pihak Kedua


JULIADI, S.Kep, M.IP
Penata TK 1
NIP.19790721 199803 1 001

Dumai, 2024
Pihak Pertama


ALEX MARTHIN, SH, MH
Penata
NIP.19820503 201503 1 001



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ERNAWATI, S.Sos
Jabatan : JF. PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA
Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*
Nama : MARTALENA, SKM
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Selaku atasan langsung *Pihak Pertama*

Selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab *Pihak Pertama*.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dumai, 2024
Pihak Pertama

MARTALENA, SKM
Penata Tk.I
NIP.19721107 199201 2 001

ERNAWATI, S.Sos
Penata Tk. I
NIP.19670404 198903 2 003



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MARTALENA, SKM
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL
Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*
Nama : drg. HERMIYATI
Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI

Selaku atasan langsung *Pihak Pertama*

Selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab *Pihak Pertama*.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dumai, 2024
Pihak Pertama

drg. HERMIYATI
Penata Utama Muda
NIP.19711229 200012 2 001

MARTALENA, SKM
Penata Tk.I
NIP.19721107 199201 2 001

Lampiran Perjanjian Kinerja

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan
				2024
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	8.152
2	Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	2

Dumai, Januari 2024

Pihak Kedua
Kabd Pemberdayaan Sosial

Pihak Pertama
JF. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda

MARTALENA, SKM
NIP. 19721107 199201 2 001

ERNAWATI, S.Sos
NIP. 19670404 198903 2 003

Lampiran Perjanjian Kinerja

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan
				2024
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang diberdayakan	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang diberdayakan	%	100
		Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang diberdayakan	%	100
		Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	74
		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	7
2	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	8.397
		Persentase pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	%	100
		Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	%	100
		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	55

PROGRAM / KEGIATAN

ANGGARAN

1. Program Pemberdayaan Sosial	Rp 551.164.140
1.1 Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Rp 551.164.140
1.1.1 Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 442.598.720
1.1.2 Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 42.544.320

1.1.3 Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	66.021.100
2. Program Pengelolaan taman makam pahlawan	Rp	17.458.900
2.1 Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp	17.458.900
2.1.1 Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp	17.458.900
JUMLAH	Rp	568.623.040

Dumai, Januari 2024



Pihak Pertama
Kabid Pemberdayaan Sosial
Martalena SKM
MARTELENA, SKM
NIP. 19721107 199201 2 001



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WAHYUNI HARTUTI, ST

Jabatan : JF. PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : MARTELENA, SKM

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Selaku atasan langsung *Pihak Pertama*

Selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab *Pihak Pertama*.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Martalena SKM
MARTELENA, SKM
Penata Tk.I
NIP. 19721107 199201 2 001

Wahyuni Hartuti ST
WAHYUNI HARTUTI, ST
Penata Tk. I
NIP.19830516 201001 2 038

Lampiran Perjanjian Kinerja

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Setuan	Target Tahunan
				2024
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Permeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	55

Dumai, Januari 2024

Pihak Kedua
Kabid Pemberdayaan Sosial

Pihak Pertama
JF. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda

Martalena SKM
MARTELENA, SKM
NIP. 19721107 199201 2 001

Wahyuni Hartuti ST
WAHYUNI HARTUTI, ST
NIP. 19830516 201001 2 038



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUHARTATI, SKM

Jabatan : JF. PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : NURBAITI, SKM, M.SI

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Selaku atasan langsung *Pihak Pertama*

Selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab *Pihak Pertama*.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lampiran Pejanjian Kinerja

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan 2024
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	36
2	Terlaksananya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	36
3	Terlaksananya Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	36
4	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	50
5	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	50

Pihak Kedua

NURBAITI, SKM, M.SI
Pembina
NIP. 19681210 198811 2 002

Dumai, 2024

Pihak Pertama

SUHARTATI, SKM
Penata
NIP.19780304 200312 2 005

Pihak Kedua
Kabid Pemberdayaan
Masyarakat

NURBAITI, SKM, M.SI
NIP. 19681210 198811 2 002

Dumai, Januari 2024

Pihak Pertama
JF. Penggerak Swadaya
Masyarakat Ahli Muda

SUHARTATI, SKM
NIP. 19780304 200312 2 005



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NURBAITI, SKM, M.SI

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : drg. HERMIYATI

Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA DUMAI

Selaku atasan langsung *Pihak Pertama*

Selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab *Pihak Pertama*.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

drg. HERMIYATI
Pembina Utama Muda
NIP.19711229 200012 2 001

Dumai, 2024
Pihak Pertama

NURBAITI, SKM, M.SI
Pembina
NIP. 19681210 198811 2 002

Lampiran Perjanjian Kinerja

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan 2024
1	Tertaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa/kelurahan	Persentase Kinerja dan Manajemen Aparatur Pemerintah Kelurahan dalam Perencanaan Pembangunan Persentase Profil Kelurahan yang sesuai dengan standar Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	% % Dokumen	100 100 36
2	Tertaksananya Kegiatan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase LPM yang lebih Produktif dan Mandiri dalam Perencanaan Pembangunan Persentase Kegiatan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendsyusunan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	% % Dokumen Lembaga Dokumen Laporan Laporan Keluarga Keluarga	100 100 36 36 36 36 50 50

PROGRAM / KEGIATAN

1. Program Administrasi Pemerintahan Desa
 1.1 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 1.1.1 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa

ANGGARAN

Rp 270.000.000
 Rp 270.000.000
 Rp 170.000.000

1.1.2 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Rp	100.000.000
2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Rp	1.899.400.000
2.1 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Rp	1.899.400.000
2.1.1 Fasilitasi Penataan , Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW , PKK, Posyandu , LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	Rp	1.099.400.000
2.1.2 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW , PKK, Posyandu , LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa /Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp	150.000.000
2.1.3 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Rp	50.000.000
2.1.4 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Rp	100.000.000
2.1.5 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Rp	100.000.000
2.1.6 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Rp	100.000.000
2.1.7 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Rp	100.000.000
JUMLAH	Rp	1.969.400.000

Dumai, Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala,



drg. HERMIYATI

NIP. 19711229 200012 2 001

Pihak Pertama
Kabid Pemberdayaan
Masyarakat



NURBADI SKM, M.Si

NIP. 19681219 198811 2 002



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **JULIANA, SKM**
Jabatan : **JF. PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA**

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : **NURBAITI, SKM, M.SI**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Selaku atasan langsung *Pihak Pertama*

Selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab *Pihak Pertama*.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

NURBAITI, SKM, M.SI
Pembina
NIP. 19681210 198811 2 002

Dumai, 2024
Pihak Pertama

JULIANA, SKM
Penata Tk.I
NIP. 19820712 20064 2 006

Lampiran Perjanjian Kinerja

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan 2024
1	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Dokumen	36
2	Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	36

Dumai, Januari 2024

Pihak Kedua
Kabid Pemberdayaan Masyarakat

NURBAITI, SKM, M.SI
NIP. 19681210 198811 2 002

Pihak Pertama
JF. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda

JULIANA, SKM
NIP. 19820712 20064 2 006



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ADHAR KASIH, SE**

Jabatan : **JF. PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **NURBAITI, SKM, M.SI**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lampiran Perjanjian Kinerja

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan
				2024
1	2	3	4	5
1	Tertaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	30
2	Tertaksananya Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	30

Dumai, Januari 2024

Pihak Kedua
Kabid Pemberdayaan
Masyarakat

NURBAITI, SKM, M.SI
NIP. 19681210 198811 2 002

Pihak Pertama
JF. Penggerak Swadaya
Masyarakat Ahli Muda

ADHAR KASIH, SE
NIP. 19830917 201001 1 017

Pihak Kedua

NURBAITI, SKM, M.SI
Pembina
NIP. 19681210 198811 2 002

Dumai, 2024
Pihak Pertama

ADHAR KASIH, SE
Penata Tk. I
NIP.19830917 201001 1 017



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JUNAIDI, SE

Jabatan : JF. PERENCANA AHLI MUDA

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : RINO PARLINDUNGAN, ST, MT

Jabatan : SEKRETARIS

Selaku atasan langsung *Pihak Pertama*

Selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab *Pihak Pertama*.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lampiran Perjanjian Kinerja

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Batuan	Target Tahunan 2024
1	2	3	4	5
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2
2	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1
3	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1
4	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1
5	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1
6	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3
7	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3

Dumai, Januari 2024

Pihak Kedua

RINO PARLINDUNGAN, ST, MT
Pembina TK.I
NIP.19790721 199803 1 001

Dumai, 2024
Pihak Pertama

JUNAIDI, SE
Penata
NIP.19820525 201101 1 005

Pihak Kedua
Sekretaris,

RINO PARLINDUNGAN, ST, MT
NIP. 19731116 200003 1 001

Pihak Pertama
JF-Perencana Ahli Muda

JUNAIDI, SE
NIP. 19820525 201101 1 005



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IRA APRILIDIANTY, AMK

Jabatan : JF. ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : RINO PARLINDUNGAN, ST, MT

Jabatan : SEKRETARIS

Selaku atasan langsung *Pihak Pertama*

Selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab *Pihak Pertama*.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

RINO PARLINDUNGAN, ST, MT
Pembina Tk.I
NIP.19790721 199603 1 001

Dumai, 2024
Pihak Pertama

IRA APRILIDIANTY, AMK
Penata Tk.I
NIP.19820424 200604 2 024

Lampiran Perjanjian Kinerja

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Setuan	Target Tahunan 2024
1	2	3	4	5
1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	20
2	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1
3	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2
4	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2

Dumai, Januari 2024

Pihak Kedua
Sekretaris,

RINO PARLINDUNGAN, ST, MT
NIP. 19731116 200003 1 001

Pihak Pertama
JF. Analis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda

IRA APRILIDIANTY, AMK
NIP. 19820424 200604 2 024



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **LIZZA ARTANTI**
Jabatan : **PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
Nama : **RINO PARLINDUNGAN, ST, MT**
Jabatan : **SEKRETARIS**

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Lampiran Perjanjian Kinerja

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan
				2024
1	2	3	4	5
1	Tersedianya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yang disusun	Laporan	1
2	Tersedianya Dokumen RKA Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen RKA yang dihasilkan	Dokumen	1
3	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang dihasilkan	Dokumen	1
4	Tersedianya Dokumen DPA Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen DPA yang dihasilkan	Dokumen	1
5	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang dihasilkan	Dokumen	1

Dumai, Januari 2024

Pihak Kedua
Sekretaris,



RINO PARLINDUNGAN, ST, MT
NIP. 19731116 200003 1 001

Pihak Pertama
Pengadministrasian Perencanaan
Dan Program


LIZZA ARTANTI
NIP. 19840826 200701 2 001

Pihak Kedua

Dumai, 2024
Pihak Pertama


RINO PARLINDUNGAN, ST, MT
Pembina TK.I
NIP.19790721 199803 1 001


LIZZA ARTANTI
Penata Muda
NIP.19840826 200701 2 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI TAHUN 2024

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : drg. HERMIYATI
Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA DUMAI

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. PAISAL, SKM, MARS
Jabatan : WALIKOTA DUMAI

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024
Pihak Pertama


H. PAISAL, SKM, MARS



drg. HERMIYATI
 Pembina Utama Muda
 NIP.19711229 200012 2 001


LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI			
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Dan Gelandangan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Diluar Panti (Indikator SPM)	100%
2	Meningkatnya Penanggulangan Korban Bencana	Persentase Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kab/Kota (Indikator SPM)	100%
3	Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Persentase Kelurahan Cepat Berkembang Persentase PKK Aktif	80% 100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.126.209.060	Sumber Dana APBD
2. Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 791.946.460	Sumber Dana APBD
3. Program penanganan warga negara Migran korban tindak kekerasan	Rp. 10.000.000	Sumber Dana APBD
4. Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 1.333.500.000	Sumber Dana APBD
5. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Rp.17.218.454.500	Sumber Dana APBD
6. Program Penanganan Bencana	Rp. 636.586.500	Sumber Dana APBD
7. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 40.054.700	Sumber Dana APBD
8. Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 270.000.000	Sumber Dana APBD
9. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 1.699.400.000	Sumber Dana APBD
Jumlah	Rp. 29.126.151.220	

Dumai, September 2024
Pihak Kedua


H. PAISAL, SKM, MARS


drg. HERMIYATI
 Pembina Utama Muda
 NIP.19711229 200012 2 001

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RINO PARLINDUNGAN, ST, MT
Jabatan : SEKRETARIS DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : drg. HERMIYATI
Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024
Pihak Pertama


drg. HERMIYATI
 Pembina Utama Muda
 NIP.19711229 200012 2 001


RINO PARLINDUNGAN, ST, MT
 Pembina Tk.I
 NIP. 19731116 200003 1 001

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI			
No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	100%
2	Meningkatnya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%
3	Meningkatnya Pemenuhan Pelaporan dan Capaian Kinerja	Persentase Pemenuhan Pelaporan dan Capaian Kinerja	100%

Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota		
1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 18.900.000	Sumber Dana APBD
1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 4.502.549.760	Sumber Dana APBD
1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 24.300.000	Sumber Dana APBD
1.4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 4.000.000	Sumber Dana APBD
1.5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 405.998.200	Sumber Dana APBD
1.6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 801.202.700	Sumber Dana APBD
1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Desa	Rp. 1.050.351.040	Sumber Dana APBD
1.8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 318.907.360	Sumber Dana APBD
Jumlah	Rp. 7.126.209.060	

Dumai, September 2024
Pihak Pertama


drg. HERMIYATI
 Pembina Utama Muda
 NIP.19711229 200012 2 001


RINO PARLINDUNGAN, ST, MT
 Pembina Tk.I
 NIP. 19731116 200003 1 001

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **EITIN NOVA OKTAVIA, SKM**
 Jabatan : **KASUBBAG KETATAUSAHAAN**
 Selanjutnya disebut Pihak Pertama
 Nama : **RINO PARLINDUNGAN, ST, MT**
 Jabatan : **SEKRETARIS**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dumai, September 2024
Pihak Pertama

RINO PARLINDUNGAN, ST, MT
Pembina TK.I
NIP.19790721 199803 1 001

EITIN NOVA OKTAVIA, SKM
Penata TK.I
NIP.19751018 199803 2 004

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI**

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI			
No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang
2	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
3	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket
4	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket
5	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket
6	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket
7	Tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen
8	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
9	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	36 Unit
10	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	76 Unit
11	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
12	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan
13	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
14	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit
15	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit
16	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit
17	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	1 Unit

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urus Pemerintahan Daerah		
1.1 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
1.1.1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 4.000.000	Sumber Dana APBD
1.2 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
1.2.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 2.246.000	Sumber Dana APBD
1.2.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 63.314.100	Sumber Dana APBD
1.1.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 7.057.100	Sumber Dana APBD
1.1.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 27.247.600	Sumber Dana APBD
1.1.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 20.821.000	Sumber Dana APBD
1.1.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 13.830.000	Sumber Dana APBD
1.1.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 271.482.400	Sumber Dana APBD
1.3 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1.3.1 Pengadaan Mebel	Rp. 484.520.000	Sumber Dana APBD
1.3.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 316.682.700	Sumber Dana APBD
1.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1.4.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 1.500.000	Sumber Dana APBD
1.4.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 87.369.000	Sumber Dana APBD
1.4.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 961.482.040	Sumber Dana APBD
1.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1.5.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 35.000.000	Sumber Dana APBD

1.5.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 149.957.360	Sumber Dana APBD
1.5.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 28.550.000	Sumber Dana APBD
1.5.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 105.400.000	Sumber Dana APBD
JUMLAH	Rp. 2.580.459.300	

Pihak Kedua

Dumai, September 2024
Pihak Pertama

RINO PARLINDUNGAN, ST, MT
Pembina TK.I
NIP.19790721 199803 1 001

EITIN NOVA OKTAVIA, SKM
Penata TK.I
NIP.19751018 199803 2 004

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **IRA APRILIDIANTY, AMK**
 Jabatan : **JF. ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA**
 Selanjutnya disebut Pihak Pertama
 Nama : **RINO PARLINDUNGAN, ST, MT**
 Jabatan : **SEKRETARIS**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua
 Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
 Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024
 Pihak Pertama

Pihak Kedua

RINO PARLINDUNGAN, ST, MT
 Pembina TK.I
 NIP.19790721 199803 1 001

IRA APRILIDIANTY, AMK
 Penata Tk.I
 NIP.19820424 200604 2 024

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI**

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI**

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang
2	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
3	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen
4	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Program Penujangan Urusa Pemerintahan Daerah		
1.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
1.1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 4.498.499.760	Sumber Dana APBD
1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 1.950.000	Sumber Dana APBD
1.1.3 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp. 2.100.000	Sumber Dana APBD
1.2 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
1.2.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 24.300.000	Sumber Dana APBD
JUMLAH	Rp. 4.526.849.760	

Dumai, September 2024
 Pihak Pertama

Pihak Kedua

RINO PARLINDUNGAN, ST, MT
 Pembina TK.I
 NIP.19790721 199803 1 001

IRA APRILIDIANTY, AMK
 Penata Tk.I
 NIP.19820424 200604 2 024

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YENI WAHYUNI**
 Jabatan : **PENGADMINISTRASIAN UMUM**
 Selanjutnya disebut Pihak Pertama
 Nama : **EITIN NOVA OKTAVIA, SKM**
 Jabatan : **KASUBBAG KETATAUSAHAAN**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua
 Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
 Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024
 Pihak Pertama

Pihak Kedua

EITIN NOVA OKTAVIA, SKM
 Penata TK.I
 NIP.19751018 199803 2 004

YENI WAHYUNI
 Penata Muda
 NIP.19820629 200701 2 002004

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI**

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI**

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Terpenuhinya Administrasi Perkantoran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Agenda Surat Keluar dan Masuk Persentase Pengarsipan Surat Persentase Pengusulan kenaikan gaji berkala Persentase Pengusulan Cuti Tahunan ASN	100% 100% 100% 100%

Dumai, September 2024
 Pihak Pertama

Pihak Kedua

EITIN NOVA OKTAVIA, SKM
 Penata TK.I
 NIP.19751018 199803 2 004

YENI WAHYUNI
 Penata Muda
 NIP.19820629 200701 2 002004

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HARDIANTO**
 Jabatan : **PENGADMINISTRASIAN UMUM**
 Selanjutnya disebut Pihak Pertama
 Nama : **EITIN NOVA OKTAVIA, SKM**
 Jabatan : **KASUBBAG KETATAUSAHAAN**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024
Pihak Pertama

Pihak Kedua

EITIN NOVA OKTAVIA, SKM
 Penata TK.I
 NIP.19751018 199803 2 004

HARDIANTO
 Penata Muda
 NIP.19741022 200604 1 005

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI**

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI**

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Tersedianya dokumen urusan ketatausahaan dan administrasi umum	Jumlah draf dokumen urusan ketatausahaan dan administrasi umum	2 Dokumen
2	Tersedianya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah draf Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan

Dumai, September 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama

EITIN NOVA OKTAVIA, SKM
 Penata TK.I
 NIP.19751018 199803 2 004

HARDIANTO
 Penata Muda
 NIP.19741022 200604 1 005

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **LIZZA ARTANTI**
 Jabatan : **PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM**
 Selanjutnya disebut Pihak Pertama
 Nama : **RINO PARLINDUNGAN, ST, MT**
 Jabatan : **SEKRETARIS**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024
Pihak Pertama

Pihak Kedua

RINO PARLINDUNGAN, ST, MT
 Pembina TK.I
 NIP.19790721 199803 1 001

LIZZA ARTANTI
 Penata Muda
 NIP.19840826 200701 2 0

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI**

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI**

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Tersedianya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yang disusun	1 Laporan
2	Tersedianya Dokumen RKA Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen RKA yang dihasilkan	1 Dokumen
3	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang dihasilkan	1 Dokumen
4	Tersedianya Dokumen DPA Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen DPA yang dihasilkan	1 Dokumen
5	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang dihasilkan	1 Dokumen

Dumai, September 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama

RINO PARLINDUNGAN, ST, MT
 Pembina TK.I
 NIP.19790721 199803 1 001

LIZZA ARTANTI
 Penata Muda
 NIP.19840826 200701 2 0

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JUNAIDI, SE

Jabatan : JF. PERENCANA AHLI MUDA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : RINO PARLINDUNGAN, ST, MT

Jabatan : SEKRETARIS

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dumai, September 2024
Pihak Pertama

RINO PARLINDUNGAN, ST, MT
Pembina TK.I
NIP.19790721 199803 1 001

JUNAIDI, SE
Penata
NIP.19820525 201101 1 0054

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI**

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI			
No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
2	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
3	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
4	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen
5	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen
6	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan
7	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Program Penujng Urusa Pemerintahan Daerah		
1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 2.100.000	Sumber Dana APBD

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.1.2 Koordinasi dan Penyusun Dokumen RKA-SKPD	Rp. 2.100.000	Sumber Dana APBD
1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp. 2.100.000	Sumber Dana APBD
1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp. 2.100.000	Sumber Dana APBD
1.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp. 2.100.000	Sumber Dana APBD
1.1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 6.300.000	Sumber Dana APBD
1.1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 2.100.000	Sumber Dana APBD
JUMLAH	Rp. 18.900.000	

Pihak Kedua

Dumai, September 2024
Pihak Pertama

RINO PARLINDUNGAN, ST, MT
Pembina TK.I
NIP.19790721 199803 1 001

JUNAIDI, SE
Penata
NIP.19820525 201101 1 0054

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NOVIA ANDRIANI, S.Kep, M.Si**

Jabatan : **KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **drg. HERMIYATI**

Jabatan : **KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA DUMAI**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



drg. HERMIYATI
Pembina Utama Muda
NIP.19711229 200012 2 001

Dumai, September 2024
Pihak Pertama

NOVIA ANDRIANI, S.Kep, M.Si
Pembina
NIP.19781126 200501 2 003

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI**

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI**

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Terwujudnya Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa /Kelurahan Asal	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota ke Desa/ Kelurahan Asal	100%
2	Tercapainya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang tertangani di Luar Panti Sosial	100%

Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan		
1.1 Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Rp. 10.000.000	Sumber Dana APBD
2. Program Rehabilitasi Sosial		
2.1 Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rp.1.373.500.000	Sumber Dana APBD
Jumlah	Rp.1.383.500.000	

Pihak Kedua

drg. HERMIYATI
Pembina Utama Muda
NIP.19711229 200012 2 001

Dumai, September 2024
Pihak Pertama

NOVIA ANDRIANI, S.Kep, M.Si
Pembina
NIP.19781126 200501 2 003

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **TENGGU SA'ADIAH, SH**

Jabatan : **JF. PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **NOVIA ANDRIANI, S.Kep, M.Si**

Jabatan : **KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

NOVIA ANDRIANI, S.Kep, M.Si
Pembina
NIP.19781126 200501 2 003

Dumai, September 2024
Pihak Pertama

TENGGU SA'ADIAH, SH
Penata Tk. I
NIP.19730703 200112 2 001

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI**

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa /Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang
2	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan		
1.1 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		
1.1.1 Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten /Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Rp. 10.000.000	Sumber Dana APBD
2. Program Rehabilitasi Sosial		
2.1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantai Sosial		
2.1.1 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Rp. 250.000.000	Sumber Dana APBD
Jumlah	Rp. 260.000.000	

Pihak Kedua

NOVIA ANDRIANI, S.Kep, M.Si
Pembina
NIP.19781126 200501 2 003

Dumai, September 2024
Pihak Pertama

TENGGU SA'ADIAH, SH
Penata Tk. I
NIP.19730703 200112 2 001

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DIAN EKAWATI, S.IP**
Jabatan : **JF. PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **NOVIA ANDRIANI, S.Kep, M.Si**
Jabatan : **KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

NOVIA ANDRIANI, S.Kep, M.Si
Pembina
NIP.19781126 200501 2 003

Dumai, September 2024
Pihak Pertama

DIAN EKAWATI, S.IP
Penata Tk.I
NIP.19800910 200604 2 018

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI**

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI			
No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan PerOrang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang
2	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang
3	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	110 Orang
4	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang
5	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang
6	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang
7	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1. Program Rehabilitasi Sosial			
1.1 Rehabilitasi Sosial Dasar			
Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantli Sosial			

Program/Kegiatan	Rp.	Anggaran	Keterangan
1.1.1 Penyediaan Permakanan	Rp.	603.500.000	Sumber Dana APBD
1.1.2 Penyediaan Sandang	Rp.	30.000.000	Sumber Dana APBD
1.1.3 Penyediaan Alat Bantu	Rp.	165.000.000	Sumber Dana APBD
1.1.4 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Rp.	30.000.000	Sumber Dana APBD
1.1.5 Pemberian Layanan Kedaruratan	Rp.	250.000.000	Sumber Dana APBD
1.1.6 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Rp.	25.000.000	Sumber Dana APBD
1.1.7 Pemberian Layanan Rujukan	Rp.	170.000.000	Sumber Dana APBD
Jumlah	Rp.	1.273.500.000	

Pihak Kedua

NOVIA ANDRIANI, S.Kep, M.Si
Pembina
NIP.19781126 200501 2 003

Dumai, September 2024
Pihak Pertama

DIAN EKAWATI, S.IP
Penata Tk.I
NIP.19800910 200604 2 018

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YUHANIS**
Jabatan : **PENGADMINISTRASIAN UMUM**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **NOVIA ANDRIANI, S.Kep, M.Si**
Jabatan : **KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024
Pihak Pertama

Pihak Kedua

NOVIA ANDRIANI, S.Kep, M.Si
Pembina
NIP.19781126 200501 2 003

YUHANIS
Penata Muda
NIP.19760803 200604 2 009

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI**

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI**

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Terpenuhinya Administrasi Perkantoran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Pengarsipan Surat Masuk dan Kluar pada bidang Rehabilitasi Sosial	100%
		Persentase Administrasi Dokumen Kegiatan Bidang Rehabilitasi Sosial	100%

Dumai, September 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama

NOVIA ANDRIANI, S.Kep, M.Si
Pembina
NIP.19781126 200501 2 003

YUHANIS
Penata Muda
NIP.19760803 200604 2 009

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **JULIADI, S.Kep, M.IP**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **drg. HERMIYATI**
Jabatan : **KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024
Pihak Pertama

Pihak Kedua



drg. HERMIYATI
Pembina Utama Muda
NIP.19711229 200012 2 001

JULIADI, S.Kep, M.IP
Penata Tk.I
NIP.19790721 199803 1 001

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI**

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI**

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase pmks yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100%
3	Terpenuhinya Kebutuhan dasar korban bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial kab/kota yang tertangani	100%

Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		
1.1 Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Rp. 104.940.500	Sumber Dana APBD
1.2 Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 17.113.514.000	Sumber Dana APBD
2. Program Penanganan Bencana		
2.1 Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Rp. 209.309.500	Sumber Dana APBD
2.2 Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 427.277.000	Sumber Dana APBD
Jumlah	Rp. 17.855.041.000	

Pihak Kedua

Dumai, September 2024
Pihak Pertama

drg. HERMIYATI
Pembina Utama Muda
NIP.19711229 200012 2 001

JULIADI, S.Kep, M.IP
Penata Tk.I
NIP.19790721 199803 1 001

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ALEX MARTHIN, SH, MH**

Jabatan : **JF. PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **JULIADI, S.Kep, M.IP**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dumai, September 2024
Pihak Pertama

JULIADI, S.Kep, M.IP
Pejabat TK.I
NIP.19790721 199803 1 001

ALEX MARTHIN, SH, MH
Penata
NIP.19820503 201503 1 001

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI**

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI			
No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Terlaksananya Penjangkauan Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang
2	Terlaksananya Rujukan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang
3	Terlaksananya Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang
4	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5.953 Keluarga
5	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial		
1.1 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		
1.1.1 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Rp. 48.410.500	Sumber Dana APBD
1.1.2 Rujukan Anak-Anak Terlantar	Rp. 27.180.000	Sumber Dana APBD
1.1.3 Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Rp. 29.350.000	Sumber Dana APBD
1.2 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
1.2.1 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Rp. 16.996.994.000	Sumber Dana APBD

Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
2. Program Penanganan Bencana		
2.1 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		
2.1.1 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Rp. 50.000.000	Sumber Dana APBD
Jumlah	Rp. 17.151.934.500	

Dumai, September 2024	
Pihak Kedua	Pihak Pertama
JULIADI, S.Kep, M.IP Pejabat TK.I NIP.19790721 199803 1 001	ALEX MARTHIN, SH, MH Penata NIP.19820503 201503 1 001

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **GAZALI TAUHID AL DJAMHUR, A.Md**

Jabatan : **JF. PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **JULIADI, S.Kep, M.IP**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dumai, September 2024
Pihak Pertama

JULIADI, S.Kep, M.IP
Penata TK.I
NIP.19790721 199803 1 001

GAZALI TAUHID AL DJAMHUR, A.Md
Penata
NIP.19710419 200604 1 003

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **KARTINI SARI DEWI, S.Pi, M.Si**

Jabatan : **JF. PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **JULIADI, S.Kep, M.IP**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dumai, September 2024
Pihak Pertama

JULIADI, S.Kep, M.IP
Penata TK.I
NIP.19790721 199803 1 001

KARTINI SARI DEWI, S.Pi, M.Si
Penata TK.I
NIP.19840421 201001 2 043

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI**

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI			
No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang
2	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang
3	Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kampung
4	Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	41 Orang
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
I. Program Penanganan Bencana			
1.1 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			
1.1.1 Penyediaan Makanan		Rp. 109.309.500	Sumber Dana APBD
1.1.2 Penyediaan Sandang		Rp. 50.000.000	Sumber Dana APBD
1.2 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			
1.2.1 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana		Rp. 50.000.000	Sumber Dana APBD
1.2.1 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Rp. 377.277.000	Sumber Dana APBD
Jumlah		Rp. 586.586.500	
Pihak Kedua		Dumai, September 2024 Pihak Pertama	
 JULIADI, S.Kep, M.IP Penata TK.I NIP.19790721 199803 1 001		 GAZALI TAUHID AL DJAMHUR, A.Md Penata NIP.19710419 200604 1 003	

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI**

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI			
No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	135.761 Orang
2	Terlaksananya Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	30.530 Keluarga
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
I. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial			
1.1 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
1.1.1 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota		Rp. 42.520.000	Sumber Dana APBD
1.1.2 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota		Rp. 74.000.000	Sumber Dana APBD
Jumlah		Rp. 116.520.000	
Pihak Kedua		Dumai, September 2024 Pihak Pertama	
 JULIADI, S.Kep, M.IP Penata TK.I NIP.19790721 199803 1 001		 KARTINI SARI DEWI, S.Pi, M.Si Penata TK.I NIP.19840421 201001 2 043	

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NURBAITI, SKM, M.Si**
 Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**
 Selanjutnya disebut Pihak Pertama
 Nama : **drg. HERMIYATI**
 Jabatan : **KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA DUMAI**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua
 Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024
Pihak Kedua

Dumai, September 2024
Pihak Pertama

drg. HERMIYATI
 Pembina Utama Muda
 NIP.19711229 200012 2 001

NURBAITI, SKM, M.Si
 Pembina
 NIP. 19681210 198811 2 002

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI**

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI			
No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Kapasitas Kinerja dan Manajemen Aparatur	Persentase Kelurahan Yang Tertib Administrasi Pemerintahannya	100%
2	Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lkk) Yang Aktif	100%

Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Program Administrasi Pemerintahan Desa		
1.1 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 270.000.000	Sumber Dana APBD
2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat		
2.1 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Rp. 1.699.400.000	Sumber Dana APBD
Jumlah	Rp. 1.969.400.000	

Dumai, September 2024
Pihak Kedua

Dumai, September 2024
Pihak Pertama

drg. HERMIYATI
 Pembina Utama Muda
 NIP.19711229 200012 2 001

NURBAITI, SKM, M.Si
 Pembina
 NIP. 19681210 198811 2 002

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **JULIANA, SKM**
 Jabatan : **JF. PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA**
 Selanjutnya disebut Pihak Pertama
 Nama : **NURBAITI, SKM, M.Si**
 Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua
 Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024
Pihak Kedua

Dumai, September 2024
Pihak Pertama

NURBAITI, SKM, M.Si
 Pembina
 NIP. 19681210 198811 2 002

JULIANA, SKM
 Penata Tk.I
 NIP. 19820712 20064 2 006

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI**

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI			
No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	36 Dokumen
2	Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	36 Dokumen

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Program Administrasi Pemerintahan Desa		
1.1 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		
1.1.1 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Rp. 170.000.000	Sumber Dana APBD
1.1.2 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Rp. 100.000.000	Sumber Dana APBD
Jumlah	Rp. 270.000.000	

Dumai, September 2024
Pihak Kedua

Dumai, September 2024
Pihak Pertama

NURBAITI, SKM, M.Si
 Pembina
 NIP. 19681210 198811 2 002

JULIANA, SKM
 Penata Tk.I
 NIP. 19820712 20064 2 006

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUHARTATI, SKM

Jabatan : JF. PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : NURBAITI, SKM, M.SI

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dumai, September 2024
Pihak Pertama

NURBAITI, SKM, M.SI
Pembina
NIP. 19681210 198811 2 002

SUHARTATI, SKM
Penata
NIP.19780304 200312 2 005

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI**

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI			
No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	36 Dokumen
2	Terlaksananya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	36 Lembaga
3	Terlaksananya Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	36 Laporan
4	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	50 Keluarga
5	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat		
1.1 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah		

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.1.1 Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 1.099.400.000	Sumber Dana APBD
1.1.2 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 150.000.000	Sumber Dana APBD
1.1.3 Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Rp. 100.000.000	Sumber Dana APBD
1.1.4 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Rp. 100.000.000	Sumber Dana APBD
1.1.5 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Rp. 100.000.000	Sumber Dana APBD
Jumlah	Rp. 1.549.400.000	

Pihak Kedua

Dumai, September 2024
Pihak Pertama

NURBAITI, SKM, M.SI
Pembina
NIP. 19681210 198811 2 002

SUHARTATI, SKM
Penata
NIP.19780304 200312 2 005

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ADHAR KASHI, SE**
Jabatan : **JF. PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : **NURBAITI, SKM, M.Si**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dumai, September 2024
Pihak Pertama

NURBAITI, SKM, M.Si
Pembina
NIP. 19681210 198811 2 002

ADHAR KASHI, SE
Penata Tk. I
NIP.19830917 201001 1 017

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI**

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI**

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	36 Dokumen
2	Terlaksananya Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	36 Laporan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat		
1.1 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah		
1.1.1 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Rp. 50.000.000	Sumber Dana APBD
1.1.2 Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Rp. 100.000.000	Sumber Dana APBD
Jumlah	Rp. 150.000.000	

Pihak Kedua

Dumai, September 2024
Pihak Pertama

NURBAITI, SKM, M.Si
Pembina
NIP. 19681210 198811 2 002

ADHAR KASHI, SE
Penata Tk. I
NIP.19830917 201001 1 017

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MARTALENA, SKM**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : **drg. HERMIYATI**

Jabatan : **KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dumai, September 2024
Pihak Pertama



drg. HERMIYATI
Pembina Utama Muda
NIP.19711229 200012 2 001

MARTALENA, SKM
Penata Tk.1
NIP.19721107 199201 2 001

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI**

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI**

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang diberdayakan	100%
2	Tervujudnya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	100%

Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Program Pemberdayaan Sosial		
1.1 Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 791.946.460	Sumber Dana APBD
2. Program Pengelolaan taman makam pahlawan		
2.1 Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp. 40.054.700	Sumber Dana APBD
Jumlah	Rp. 832.001.160	

Pihak Kedua

Dumai, September 2024
Pihak Pertama

drg. HERMIYATI
Pembina Utama Muda
NIP.19711229 200012 2 001

MARTALENA, SKM
Penata Tk.1
NIP.19721107 199201 2 001

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HERLINA, S.Tr, Keb**
Jabatan : **JF. PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA**
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : **MARTELENA, SKM**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Dumai, September 2024
Pihak Pertama

MARTELENA, SKM
Penata Tk.I
NIP. 19721107 199201 2 001

HERLINA, S.Tr, Keb
Penata Muda Tk. I
NIP.19850112 201001 2 026

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI**

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI**

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	71 Orang
2	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Orang

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Program Pemberdayaan Sosial		
1.1 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		
1.1.1 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 618.764.240	Sumber Dana APBD
1.1.2 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 44.644.320	Sumber Dana APBD
Jumlah	Rp. 663.408.560	

Pihak Kedua
Dumai, September 2024
Pihak Pertama

MARTELENA, SKM
Penata Tk.I
NIP. 19721107 199201 2 001

HERLINA, S.Tr, Keb
Penata Muda Tk. I
NIP.19850112 201001 2 026

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ERNAWATI, S.Sos**
Jabatan : **JF. PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA**
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : **MARTELENA, SKM**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Dumai, September 2024
Pihak Pertama

MARTELENA, SKM
Penata Tk.I
NIP. 19721107 199201 2 001

ERNAWATI, S.Sos
Penata Tk. I
NIP.19670404 198903 2 003

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI**

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI**

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	8.152 Keluarga
2	Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Lembaga

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Program Pemberdayaan Sosial		
1.1 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		
1.1.1 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 108.537.900	Sumber Dana APBD
1.1.2 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 150.000.000	Sumber Dana APBD
Jumlah	Rp. 258.537.900	

Pihak Kedua
Dumai, September 2024
Pihak Pertama

MARTELENA, SKM
Penata Tk.I
NIP. 19721107 199201 2 001

ERNAWATI, S.Sos
Penata Tk. I
NIP.19670404 198903 2 003

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **WAHYUNI HARTUTI, ST**
Jabatan : **JF. PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MARTELENA, SKM**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua Dumai, September 2024
Pihak Pertama

MARTELENA, SKM
Penata Tk.I
NIP. 19721107 199201 2 001

WAHYUNI HARTUTI, ST
Penata Tk. I
NIP.19830516 201001 2 038

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **JOKO SISWANTO, S.Pt**
Jabatan : **KEPALA UPT RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL SERAI
SERUMPUN KELAS A**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **drg. HERMIYATI**

Jabatan : **KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA DUMAI**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua Dumai, September 2024
Pihak Pertama

drg. HERMIYATI
Pembina Utama Muda
NIP.19711229 200012 2 001

JOKO SISWANTO, S.Pt
Penata Tk.I
NIP. 19800907 2006041 001

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI**

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI			
No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	55 Makam

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
I. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		
I.1 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		
1.1.1 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten /Kota	Rp. 40.054.700	Sumber Dana APBD
Jumlah	Rp. 40.054.700	
Pihak Kedua	Dumai, September 2024	Pihak Pertama
 MARTELENA, SKM Penata Tk.I NIP. 19721107 199201 2 001		 WAHYUNI HARTUTI, ST Penata Tk. I NIP.19830516 201001 2 038

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI**

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI			
No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan PerOrang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang
2	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang

Pihak Kedua Dumai, September 2024
Pihak Pertama

drg. HERMIYATI
Pembina Utama Muda
NIP.19711229 200012 2 001

JOKO SISWANTO, S.Pt
Penata Tk.I
NIP. 19800907 2006041 001

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **REFI VENTIARANY, A.Md.Keb**
 Jabatan : **KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PADA UPT RUMAH
 PERLINDUNGAN SOSIAL SERAI SERUMPUN KELAS A**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **JOKO SISWANTO, S.Pt**
 Jabatan : **KEPALA UPT RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL SERAI
 SERUMPUN KELAS A**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dumai, September 2024
Pihak Pertama

JOKO SISWANTO, S.Pt
 Penata Tk.I
 NIP. 19800907 2006041 001

REFI VENTIARANY, A.Md.Keb
 Penata Muda Tk.I
 NIP. 19840927 201102 2 001

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI**

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi dan Perkantoran UPT Rumah Perlindungan Sosial Serai Serumpun Kelas A	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi dan Perkantoran UPT Rumah Perlindungan Sosial Serai Serumpun Kelas A	100%

Pihak Kedua

Dumai, September 2024
Pihak Pertama

JOKO SISWANTO, S.Pt
 Penata Tk.I
 NIP. 19800907 2006041 001

REFI VENTIARANY, A.Md.Keb
 Penata Muda Tk.I
 NIP. 19840927 201102 2 001

**PENGUKURAN KINERJA
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi Hitungan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	$\frac{\text{Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan, pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti}}{\text{Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan, pengemis}} \times 100 \%$	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Persentase Kelurahan Cepat Berkembang	%	$\frac{\text{Jumlah kelurahan cepat berkembang}}{\text{Jumlah kelurahan}} \times 100\%$	80%	86,11%	107,6%
		Persentase PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) Aktif	%	$\frac{\text{Jumlah PKK aktif}}{\text{Jumlah PKK}} \times 100\%$	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Penanggulangan Korban Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kab/Kota	%	$\frac{\text{Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran}}{\text{Populasi korban bencana alam dan sosial didaerah kab/ kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat daerah kab/ kota}} \times 100\%$	100%	100%	100%

Kepala Dinas Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai,



drg. HERMIYATI

Pembina Utama Muda

Nip. 19711229 200012 2 001

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN REALISASI BELANJA DINAS_SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI TAHUN 2024

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023	Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Anja Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan	Hambatan / Kendala	Tidak Lanjut				
							I		II		III		IV		12		13=127x100%		14 = E + 12		15=14/5 x 100%						16		17	18
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp	K	Rp
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=127x100%	14 = E + 12	15=14/5 x 100%	16					17	18		
		PROGRAM PENUJANGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																					DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT							
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																												
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,00	2.100.000	2	Dokumen	2.100.000		2	1.999.500		2	1.999.500	100,00%	95,21%	4,00	4.099.500	0,00%	0,00%										
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,00	1.995.000	1	Dokumen	2.100.000		1	1.996.000		1	1.996.000	100,00%	96,00%	2,00	3.990.000	0,00%	0,00%										
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,00	1.995.000	1	Dokumen	2.100.000		1			1	1.998.000	100,00%	0,00%	2,00	1.996.000	0,00%	0,00%										
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,00	2.085.000	1	Dokumen	2.100.000		1	1.998.000		1	1.998.000	100,00%	95,14%	2,00	4.083.000	0,00%	0,00%										
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,00	1.995.000	1	Dokumen	2.100.000		1			1	1.998.000	100,00%	0,00%	2,00	1.996.000	0,00%	0,00%										
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD	2,00	6.300.000	2	Laporan	6.300.000	1,5	4.620.000		1	2,0	4.620.000	100,00%	73,33%	4,00	10.920.000	0,00%	0,00%										
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Ev aluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,00	1.998.000	3	Dokumen	2.100.000		3			3		100,00%	0,00%	6,00	1.998.000	0,00%	0,00%										
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																												
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28,00	3.928.246.382	29	Orang	4.498.499.760	6,50	912.917.605	9,00	1.357.401.997	5,50	950.595.836	8	1.108.605.495	29,00	4.329.520.933	100,00%	96,24%	57,00	8.257.767.315	0,00%	0,00%						
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,00	1.050.000	1	Laporan	1.950.000		1	1.950.000		1	1.950.000	100,00%	100,00%	2,00	3.000.000	0,00%	0,00%										
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1,00	2.100.000	1	Dokumen	2.100.000		1,0	1.998.000		1	1.998.000	100,00%	95,14%	2,00	4.098.000	0,00%	0,00%										
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																												
		Pembusahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pembusahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2,00	24.300.000	2	Laporan	24.300.000	0,50	4.050.000	0,50	4.050.000	0,50	8.100.000	0,50	4.050.000	2,00	20.250.000	100,00%	83,33%	4,00	44.550.000	0,00%	0,00%						
		Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah																												
		Bimbingan Teknis	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek			1	Orang	4.000.000				1	4.000.000		1	4.000.000	100,00%	100,00%	1,00	4.000.000	0,00%	0,00%								
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																												
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,00	2.195.000	1	Paket	2.246.000	1	2.121.000			1,00	2.121.000	100,00%	94,43%	2,00	4.316.000	0,00%	0,00%										
		Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4,00	41.033.500	3	Paket	63.314.100	0,50	29.287.500	0,50	5.375.000	1,00	21.789.100	1,00	5.250.000	3,00	61.702.000	100,00%	97,45%	7,00	102.735.500	0,00%	0,00%						
		Penyediaan Perlatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Perlatan Rumah Tangga yang Disediakan	4,00	14.879.000	1	Paket	7.057.100	1	6.635.500			1	6.635.500	100,00%	94,03%	5,00	21.514.500	0,00%	0,00%										
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10,00	27.303.000	3	Paket	27.247.600	0,50	3.012.000	0,50	6.174.000	0,1	4.260.000	2	2.145.000	3,00	15.981.000	100,00%	57,22%	13,00	42.894.000	0,00%	0,00%						
		Penyediaan Barang Dataran dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Dataran dan Penggandaan yang Disediakan	2,75	12.461.499	3	Paket	20.821.000	0,50	5.775.000	0,50	2.580.000	1,00	2.663.000	1,00	11.018.000	100,00%	82,92%	5,75	23.480.099	0,00%	0,00%								

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			1,00	7.200.000	1	Dokumen	13.830.000			0,15	1.800.000	0,15	1.800.000	0,70	1.800.000	1,00	5.400.000	100,00%	39,05%	2,00	12.600.000	0,00%	0,00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1,00	264.718.445	1	Laporan	271.482.400	0,18	25.068.775	0,45	66.083.096	0,28	63.164.735	0,09	17.443.864	1,00	171.760.470	100,00%	63,27%	2,00	436.478.915	0,00%	0,00%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					179.029.000			891.202.700			123.880.000		(1.900.000)		49.674.700		171.654.700		21,42%		225.523.700		0,00%	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			1,00	125.160.000																			
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			100,00	10.850.000	36	unit	484.520.000							36		36		100,00%	0,00%	136,00	10.850.000	0,00%	0,00%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			13,00	43.019.000	76	unit	316.682.700			17	123.880.000	(1)	(1.900.000)	60	49.674.700	76	171.654.700	100,00%	54,20%	89,00	214.673.700	0,00%	0,00%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.090.693.600			1.050.351.040		176.417.539	245.973.052	252.468.732	233.811.416	908.610.769		86,51%		1.999.364.569						
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1,00	2.400.000	1	Laporan	1.500.000			1	1.500.000			1,0	1.500.000	100,00%	100,00%	2,00	3.900.000	0,00%	0,00%		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			2,00	128.819.188	2	Laporan	87.369.000	0,36	22.857.539	0,35	21.086.322	0,65	13.926.484	0,64	8.624.000	2,00	66.494.345	100,00%	76,11%	4,00	195.313.533	0,00%	0,00%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			0,00		0	Laporan											0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1,00	959.474.612	1	Laporan	961.482.040	0,16	153.560.000	0,24	224.886.760	0,25	236.982.248	0,35	225.187.416	1,00	840.616.424	100,00%	87,43%	2,00	1.800.091.036	0,00%	0,00%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					285.298.403			316.907.360		39.706.344	46.182.790	94.770.314	31.170.000	187.839.448		58,90%		473.137.851						
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			1,00	24.600.000	2	unit	35.000.000	0,52	9.000.000	0,53	9.000.000	0,65	11.000.000	0,30	3.000.000	2,00	32.000.000	100,00%	91,43%	3,00	56.600.000	0,00%	0,00%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			14,00	133.333.388	14	unit	149.957.360	2,80	27.106.344	3,75	33.462.790	5,5	64.964.439	2,00	3.700.000	14,00	129.233.673	100,00%	86,18%	28,00	262.566.961	0,00%	0,00%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			45,00	27.429.000	45	unit	28.550.000	6,00	3.600.000	6	3.730.000	30	18.805.875	3	470.000	45,00	26.605.875	100,00%	93,19%	90,00	54.034.875	0,00%	0,00%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1,00	99.936.015	1	unit	105.400.000							1		1,00		100,00%	0,00%	2,00	99.936.015	0,00%	0,00%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL, PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					546.434.280			921.946.460		48.594.900	291.053.000	272.498.800	170.162.000	782.308.700		84,85%		1.328.742.980						
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota					546.434.280			921.946.460		48.594.900	291.053.000	272.498.800	170.162.000	782.308.700		84,85%		1.328.742.980						
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			74,00	439.388.000	74	Orang	616.764.240			19	125.917.000	24	233.132.200	30	144.894.200	73,00	503.943.400	98,65%	81,44%	147,00	943.331.400	0,00%	0,00%
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			7,00	42.378.000	7	Orang	44.644.320			2	10.689.000	1,5	10.613.400	3,5	21.037.800	7,00	42.340.200	100,00%	94,84%	14,00	84.718.200	0,00%	0,00%
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			8397,00	64.688.280	8.397	Keluarga	108.537.900	4.120	48.594.900	350	4.447.000	2.410	28.753.200	350	4.230.000	7.230	86.025.100	86,10%	79,26%	15627,00	150.693.380	0,00%	0,00%

		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				2	Lembaga	150.000.000			2	150.000.000			2	150.000.000	100,00%	100,00%	2,00	150.000.000	0,00%	0,00%								
		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					2.100.000		10.000.000				5.650.000				5.650.000		56,50%		7.750.000										
		Penulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dan Tindak Debakasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal					2.100.000		10.000.000				5.650.000				5.650.000		56,50%		7.750.000										
		Facilitasi Penulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dan Tindak Debakasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Tindak Debakasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota			10,00	2.100.000	10	Orang	10.000.000	6		5.650.000			4	10	5.650.000	100,00%	56,50%	20,00	7.750.000	0,00%	0,00%							
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					3.470.356.630		1.373.500.000				216.612.363				246.752.500		299.838.329		457.675.400			1.220.878.592	88,89%	4.506.580.222					
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Tertentu, Anak Tertentu, Lanjut Usia Tertentu, serta Delandangan Pengemis di Luar Pantil Sosial					3.470.356.630		1.373.500.000				216.612.363				246.752.500		299.838.329		457.675.400			1.220.878.592	88,89%	4.506.580.222					
		Perediaan Pemakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota			100,00	309.682.000	250	Orang	603.500.000	33		32.800.000	12		11.400.000	30		132.650.000	175		360.000.000	250,00		538.850.000	100,00%	88,96%	350,00	846.532.000	0,00%	0,00%
		Perediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakian dan Kebutuhan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota			100,00	34.361.000	100	Orang	30.000.000			85,00		25.291.500	8		2.354.100	7		2.354.400	100,00			30.000.000	100,00%	100,00%	200,00	64.361.000	0,00%	0,00%
		Perediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Penggerak kearah Kewenangan Kabupaten/Kota			76,00	49.955.000	110	Orang	165.000.000			100		91.000.000			17		43.700.000	117		134.700.000	106,36%	81,64%	193,00	184.655.000	0,00%	0,00%		
		Pembelian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			100,00	30.642.300	100	Orang	30.000.000	20,0		5.673.400	13		4.150.000	22		6.670.000	45		100,0		16.493.400	100,00%	54,98%	200,00	47.135.700	0,00%	0,00%	
		Pembelian Bimbingan Fiskal, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fiskal, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota			100,00	268.216.850	100	Orang	250.000.000	37		92.119.963	19		46.755.000	19		47.643.000	25		45.981.000	100		232.498.963	100,00%	93,00%	200,00	500.715.813	0,00%	0,00%
		Pembelian Layanan Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kewenangan Kabupaten/Kota			2000,00	2.606.167.480	100	Orang	100.000.000	53		52.359.000	14		14.106.000	25		24.696.878	8		100		91.161.878	100,00%	91,16%	2100,00	2.697.329.358	0,00%	0,00%	
		Pembelian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			50,00	32.600.000	100	Orang	25.000.000	6		1.500.000	64		16.000.000	15		3.750.000	15		100		21.250.000	100,00%	85,00%	150,00	53.850.000	0,00%	0,00%	
		Pembelian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota			50,00	138.732.000	100	Orang	170.000.000	19		32.160.000	23		38.050.000	48		82.074.351	10		5.640.000	100		157.924.351	100,00%	92,90%	150,00	296.656.351	0,00%	0,00%
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					1.836.886.900		17.216.454.500				32.944.900				3.577.081.000		3.042.647.000		2.043.120.000			8.695.792.900	50,30%	10.532.679.800					
		Pemeliharaan Anak-Anak Tertentu					6.720.000		104.940.500								5.310.000		3.530.000			8.840.000			8,42%	15.500.000					
		Penjagaan Anak-Anak Tertentu	Jumlah Anak-Anak Tertentu yang Djangkau Kewenangan Kabupaten/Kota					5	Orang	48.410.500						1				1		1			20,00%	0,00%	1,00		0,00%	0,00%	
		Rujukan Anak-Anak Tertentu	Jumlah Anak-Anak Tertentu yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota					5	Orang	27.180.000						1				1		3.530.000	1		3.530.000	20,00%	12,98%	1,00	3.530.000	0,00%	0,00%

	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota		5,00	6.720.000	5	Orang	29.360.000		1	5.310.000		1	5.310.000	20,00%	18,09%	6,00	12.030.000	0,00%	0,00%											
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				1.830.166.900			17.113.514.000			32.944.900			3.577.081.000				2.039.390.000			6.686.952.900			50,76%		16.517.119.800					
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata			139700,00	139.298.000	135,761	Orang	42.520.000	18,000	12.913.300	15,000	11.373.000	7,000	(11.773.000)	95,309		135,309			12.513.300			99,67%	29,43%	275009,00	151.811.300	0,00%	0,00%		
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				30.630	Keluarga	74.000.000			10.300	24.757.000	20,230	7.270.000	30,630	32.027.000	100,00%	43,28%	30530,00		32.027.000			0,00%	0,00%						
	Facilitas bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Peserta Manfaat (JKM) yang mendapatkan bantuan sosial Kesejahteraan keluarga kewenangan kab/kota			3845,00	1.690.868.900	5,953	Keluarga	16.996.994.000	4,00	20.031.600	670,00	3.565.708.000	1,750	3.024.353.000	1,723	2.032.320.000	4,047,00			6.642.412.600			67,98%	50,85%	7892,00	10.333.281.500	0,00%	0,00%		
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA				236.647.478			636.586.500			63.269.000		67.616.200		71.871.800		90.732.600				291.889.600			45,82%		484.740.078					
	Pelindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				74.976.228			269.309.500			57.669.000		12.952.000		19.374.000		6.240.000				94.435.000			45,12%		125.814.228					
	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengangan) Kewenangan Kabupaten/Kota			150,00	66.617.228	150	Orang	109.309.500	23	7.362.000	34,0	11.452.000	45	14.724.000	48	5.340.000	150			38.878.000			100,00%	35,57%	300,00	105.495.228	0,00%	0,00%		
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakain dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengangan) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota			15,00	5.185.000	150	Orang	50.000.000	107	35.412.000	4,0	1.500.000	5,0	1.500.000	34		150,0			38.412.000			100,00%	76,82%	165,00	43.597.000	0,00%	0,00%		
	Pemanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota			10,00	3.174.000	150	Orang	50.000.000	45	14.895.000			7	2.250.000	98		150			17.145.000			100,00%	34,29%	160,00	20.319.000	0,00%	0,00%		
	Penyelenggaraan Pembudayaan Masyarakat terhadap Kelengkapan Bencana Kabupaten/Kota				161.671.250			427.277.000			5.600.000		54.664.200		52.497.800		84.492.600				197.254.600			46,17%		358.925.850					
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Tauna Siega Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kamping Siega Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota					1	Kampung	50.000.000				0,08	8.460.000	0,91	5.310.000	1,00			13.770.000			100,00%	27,54%	1,00	13.770.000	0,00%	0,00%			
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Tauna Siega Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Tauna Siega Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota			46,00	161.671.250	41	Orang	377.277.000	0,75	5.600.000	7,25	54.664.200	4,50	44.037.800	28,50	79.182.600	41,00			183.484.600			100,00%	48,63%	87,00	345.155.850	0,00%	0,00%		
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				15.410.600			48.654.700			10.000.000		18.486.400		6.320.000						34.806.400			86,96%		50.217.000					
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				15.410.600			48.654.700			10.000.000		18.486.400		6.320.000						34.806.400			86,96%		50.217.000					
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota			55,00	15.410.600	55	Makam	40.054.700	14,00	10.000.000	24,00	18.486.400	10	6.320.000	7		55			34.806.400			100,00%	86,96%	110,00	50.217.000	0,00%	0,00%		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																														
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				92.944.634			270.000.000			8.990.000		74.046.600		84.287.087						176.163.687			65,25%		269.107.721					
	Pembinaan dan Penguatan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				92.944.634			270.000.000			8.990.000		74.046.600		84.287.087						176.163.687			65,25%		269.107.721					
	Facilitas Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa			36,00	31.172.634	36	Dokumen	170.000.000	2,00	8.990.000	2,25	10.938.300	14,00	65.701.987	18		36,00			85.630.287			100,00%	50,37%	72,00	116.802.921	0,00%	0,00%		

	Faciliasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			36,00	61.771.400	36	Dokumen	100.000.000			23	63.108.300	5,50	18.585.100	8	8.840.000	36,00	90.533.400	100,00%	90,53%	72,00	152.304.800	0,00%	0,00%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					1.520.080.716			1.699.400.000			69.284.000		592.167.898		594.320.000			1.153.837.488	67,90%		2.683.018.214		-	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota					1.520.080.716			1.699.400.000			69.284.000		592.167.898		594.320.000			1.153.837.488	67,90%		2.683.018.214			
	Faciliasi Penetapan, Penyusunan dan Penyiapan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan, Penyusunan dan Penyiapan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			36,00	1.041.895.287	36	Dokumen	1.099.400.000	0,35	9.619.000	15,65	463.113.598	5,00	171.085.620	15,00	38.650.000	36,00	682.468.219	100,00%	62,08%	72,00	1.724.363.005	0,00%	0,00%
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			36,00	159.690.034	36	Lembaga	150.000.000	5	20.570.000	5	20.700.000	17	70.170.000	9	18.000.000	36	129.440.000	100,00%	86,29%	72,00	289.120.034	0,00%	0,00%
	Faciliasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa					36	Dokumen	50.000.000	1	1.350.000	1	300.000	28	40.007.750	6		36	41.657.750	100,00%	83,32%	36,00	41.657.750	0,00%	0,00%
	Faciliasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			36,00	129.172.251	36	Laporan	100.000.000	0,50	1.350.000	8,50	22.204.300	23	65.116.000	4	1.750.000	36,00	90.420.300	100,00%	90,42%	72,00	219.692.551	0,00%	0,00%
	Faciliasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat					36	Laporan	100.000.000	4,50	12.310.000	13,50	37.620.000	17,0	46.850.200	1		36,00	96.780.200	100,00%	96,78%	36,00	96.780.200	0,00%	0,00%
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat			50,00	98.748.307	50	Keluarga	100.000.000	2,50	4.520.000	12,75	26.830.000	10,75	21.621.000	24		50,00	51.971.000	100,00%	51,97%	100,00	150.719.307	0,00%	0,00%
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saling	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saling			50,00	99.584.837	50	Keluarga	100.000.000	10	19.565.000	11,00	22.400.000	7,50	14.360.000	22	4.875.000	50,00	61.200.000	100,00%	61,20%	100,00	160.784.837	0,00%	0,00%
																			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	81,09%	62,37%				
																			Predikat Kinerja	Tinggi	Rendah				
						13.628.836.667			29.296.151.220										18.271.892.297	81,09%	62,37%				
																				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	Tinggi	Rendah			

**DOKUMENTASI KEGIATAN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KOTA DUMAI TAHUN 2024**

1. PENYERAHAN BANTUAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT MISKIN









2. PENYERAHAN BANTUAN LANSIA DAN DISABILITAS







3. KEGIATAN-KEGIATAN PADA PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

a. Layanan Rujukan



b. Layanan Penelusuran Keluarga



c. Reunifikasi Keluarga



d. Bimbingan Fisik dan Mental



e. Layanan Kedaruratan



f. Penyerahan Alat Bantu



4. PENYERAHAN BANTUAN KEPADA KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL





5. KEGIATAN-KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DOKUMENTASI KEGIATAN JAMBORE



DOKUMENTASI KEGIATAN RAKON PKK



DOKUMENTASI KEGIATAN MONEV DAN PENILAIAN HKG TK PROVINSI



DOKUMENTASI KEGIATAN HARI KESATUAN GERAK PKK (HKG)



DOKUMENTASI PEMBINAAN POSYANDU
POSYANDU CEMPAKA KUNING



POSYANDU KEMBANG SEPATU



POSYANDU KOMALA I



POSYANDU TULIP

